

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tiga Agenda Utama Pembangunan.

Tabel 4.1 Matriks Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
<b>Agenda 1 : Menciptakan Kalimantan Timur Aman, Demokratis dan Damai Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa</b>	<b>Prioritas 5 :</b> Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintahan Umum. (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Keuangan, Litbang, Inspektorat / Pengawasan Daerah, Pendapatan Daerah)</li> <li>• Komunikasi dan Informasi.</li> <li>• Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.</li> <li>• Penanggulangan Bencana</li> <li>• Kepegawaian.</li> <li>• Perencanaan Pembangunan.</li> <li>• Kearsipan.</li> </ul>	-
	<b>Prioritas 10 :</b> Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbatasan</li> <li>• Pekerjaan Umum</li> <li>• Perhubungan</li> <li>• Komunikasi dan Informasi</li> <li>• Kesehatan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kebudayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmigrasi</li> </ul>
<b>Agenda 2 : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat</b>	<b>Prioritas 6 :</b> Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Penataan Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehutanan</li> <li>• Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
	<b>Prioritas 9 :</b> Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum</li> <li>• Perhubungan</li> <li>• Komunikasi dan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmigrasi</li> </ul>

AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
<b>Agenda 2 : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat</b>	<b>Prioritas 1 :</b> Ketahanan dan Kemandirian Pangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanian (Ketahanan Pangan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan)</li> <li>Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
	<b>Prioritas 7 :</b> Peningkatan Daya Saing dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanaman Modal</li> <li>Kebudayaan</li> <li>Komunikasi dan Informatika</li> <li>Pekerjaan Umum</li> <li>Perhubungan</li> <li>Penataan Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pariwisata</li> <li>Perdagangan</li> <li>Perindustrian</li> </ul>
	<b>Prioritas 4 :</b> Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koperasi dan UMKM.</li> <li>Penanaman Modal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdagangan.</li> <li>Perindustrian.</li> </ul>
<b>Agenda 3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Prioritas 2 :</b> Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Perempuan</li> <li>Sosial</li> <li>Kesehatan</li> <li>Pendidikan</li> <li>Koperasi dan UMKM</li> <li>Perumahan</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energi dan Sumberdaya Mineral</li> </ul>
	<b>Prioritas 3</b> Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga Kerja</li> <li>Koperasi dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkebunan</li> <li>Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
	<b>Prioritas 8</b> Peningkatan Mutu/Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan.</li> <li>Perpustakaan.</li> <li>Kesehatan.</li> <li>Pemuda dan Olah Raga.</li> </ul>	-

## A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

### Agenda 1 :

### Menciptakan Kalimantan Timur Aman, Demokratis dan Damai Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Upaya pencapaian target Agenda pertama ini melalui upaya pencapaian Prioritas 5; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan upaya pencapaian Prioritas 10; Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal. Capaian kinerja untuk agenda pertama sangat menggembirakan dan rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan.

## 1. Prioritas 5 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

### 1.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 5 ; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan adalah melalui pelaksanaan 26 program dan 39 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109,02 Milyar.

Tabel 4.2 Program Kegiatan Prioritas  
terkait Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas 5 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>INSPEKTORAT (ITWIL PROV)</b>
	1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	
	1.2 Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	
	1.3 Inventarisasi Temuan Pengawasan	
	1.4 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	
	1.5 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	
2	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	

	2.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	INSPEKTORAT (ITWIL PROV)
3	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		
	3.1	Bimbingan Teknis Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	
4	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)
	4.1	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	
5	Program Perencanaan Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informasi		
	5.1	Cell Plan Menara Telekomunikasi	
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
	6.1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	
	6.2	Pengembangan sarana telekomunikasi	
	6.3	Sosialisasi Mobile Community Access Point (MCAP)	
7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		BIRO PERBATASAN, PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA (BPPWK)
	7.1	Fasilitasi dan pembinaan kerjasama di lingkungan Pemprov. Kaltim dan Pemerintah Kab/Kota se Kaltim	
8	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah		
	8.1	Grand Desain Penataan Pemerintahan Daerah	
9	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)		KESBANGPOL
	9.1	Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	
	9.2	Deteksi Dini / Kewaspadaan Dini	

10	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		KESBANGPOL
	10.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	
11	Program pendidikan politik masyarakat		
	11.1	Penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat	
	11.2	Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Kaltim	
12	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
	12.1	Fasilitasi Peningkatan Unit Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	
13	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		
	13.1	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	
14	Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi		BIRO HUKUM
	14.1	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur	
15	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik		BIRO ORGANISASI
	15.1	Optimalisasi Pelayanan Sektor Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
	16.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	16.2	Gugus Kendali Pembangunan Kaltim Bangkit 2013	
	16.3	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	

17	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB)</b>
	17.1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	
	17.2	Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	
18	<b>Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik</b>		<b>BIRO HUMAS DAN PROTOKOL</b>
	18.1	Kegiatan Kehumasan	
19	<b>Program Peningkatan Sarana dan Efektivitas Manajemen Pemerintahan</b>		<b>BIRO PEMBANGUNAN DAERAH</b>
	19.1	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Serta Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan melalui Elektronik (E-procurement)	
20	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>		<b>BIRO PEMERINTAHAN UMUM</b>
	20.1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) (membangun, updating dan pemeliharaan)	
21	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	21.1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	
	21.2	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	
22	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>		<b>BADAN PERPUSTAKAAN</b>
	22.1	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar	

23	Program Standarisasi Pelayanan kesehatan		RSUD ABDUL WAHAB SYAHRANIE, RSJD ATMA HUSADA, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
	23.1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	
	23.2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	
24	Penyusunan Sistem Informasi		BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
	24.1	Penyederhanaan Prosedur Perijinan	
25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		DINAS PENDAPATAN DAERAH
	25.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	
26	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		
	26.1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	

## 1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 5; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 89,58%.

Beberapa capaian pelaksanaan pembangunan di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan antara lain:

- a. Pencapaian E-Government di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:
  - Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, Provinsi Kalimantan Timur berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan mendapatkan opini dimaksud tidak lepas dari beberapa hal diantaranya :

- Pengelolaan keuangan daerah sudah berbasis kinerja dan terintegrasi melalui Simda Keuangan.
- Penguatan Sistem Pengendalian Intern dengan diterbitkannya 1 Peraturan Daerah, 22 Peraturan Gubernur dan 2 Surat Edaran Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Pengelolaan aset daerah yang telah memiliki aplikasi berbasis komputer (Simda Barang).
- Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan serta Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran serta monitoring pengendalian program/ kegiatan, Pemerintah Kalimantan Timur berhasil memperoleh penghargaan terbaik I (satu) kategori Pemerintah Provinsi Tingkat Nasional dalam pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
- Kalimantan Timur meraih peringkat pertama Bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori Provinsi Se-Indonesia. Implementasi E-Government berbasis teknologi informasi melalui tampilan website: <http://www.kalimantan.timur.provinsi.go.id>.
- Kalimantan Timur 5 (lima) Tahun berturut-turut, sejak Tahun 2009 hingga 2013 mencatat prestasi dengan predikat Pemerintah Provinsi terbaik hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-



RB) serta Piagam Penghargaan dari Deputi Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi atas penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu sebagai pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 1999. Pada Tahun 2013 Kalimantan Timur memperoleh predikat LAKIP kategori B+.

- Berdasarkan smart-report Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penerapan pengadaan secara elektronik dengan peringkat jumlah pagu lelang secara elektronik klasifikasi Pemerintah Provinsi secara Nasional, LPSE Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan ketiga pada Tahun 2011 dan 2012, sedangkan pada Tahun 2013 meningkat pada urutan ke dua.
  - Kalimantan Timur memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap peningkatan taraf hidup dan kualitas perempuan dan anak. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang ketiga kalinya kepada Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efisien, antara lain :
- Badan Perpustakaan telah berhasil meraih piala dan penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) tingkat madya dan Citra Pelayanan Prima (CPP) tingkat utama dengan nilai A kategori Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP).
  - Pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan informasi peluang kerja dilaksanakan melalui bursa kerja

secara online dan Job Market Fair (JMF). Pada Tahun 2013 difasilitasi 264 perusahaan dengan 5.442 pencari kerja untuk 8.211 lowongan kerja. Hasil pelaksanaan JMF tersebut telah mendukung penurunan angka pengangguran dimana pencari kerja yang diterima sebanyak 2.293 pekerja, atau pencari kerja yang ditempatkan meningkat sebesar 170% dibanding Tahun 2012 sebanyak 850 pekerja.

- Pelayanan kesehatan telah memperoleh 16 akreditasi pelayanan rumah sakit dari Kementerian Kesehatan kepada RSUD AW Sjahranie, RSUD Kanudjoso, dan RSUD Tarakan. Sementara RSJD Atma Husada Mahakam telah meningkat menjadi Rumah Sakit Khusus Jiwa tipe A dan telah terakreditasi 12 pelayanan.
- Pelayanan Pajak Kendaraan Elektronik (Samsat online), telah berjalan dengan baik di 14 Kabupaten/Kota. Dengan Samsat online, pembayaran dapat dilakukan di Kabupaten/Kota domisili mereka walaupun pajak kendaraan mereka terdaftar di Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur serta sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan dari pajak kendaraan (PKB-BBNKB dan PBB-KB) sebesar 12 %.
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kalimantan Timur sampai sekarang sudah memiliki 3 Kabupaten/Kota yang PTSP-nya memiliki kualifikasi bintang yaitu, Bontang, Kukar dan Balikpapan yang penilaiannya dari BKPM pusat. Untuk Tahun 2013 PTSP Provinsi Kalimantan Timur memiliki 15 Lembaga PTSP untuk target Kabupaten/Kota agar PTSP-nya berkualifikasi bintang. PTSP Provinsi Kalimantan Timur

berupaya menstabilkan target ijin yang di keluarkan dan target PTSP yang belum berkualifikasi bintang menjadi bintang meningkat dari Tahun ke Tahunnya.

- Penataan Administrasi Kependudukan telah memberi bantuan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka Pembangunan Perangkat Pendukung Pembangunan Data Base Kependudukan Program SIAK Tingkat Provinsi melalui sistem aplikasi SIAK yang tersambung secara online antara kecamatan.
  - Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki standar layanan berbasis manajemen mutu (layanan berstandar ISO). Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut telah mengembangkan survei kepuasan pelanggan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan alat pengukuran kepuasan pelanggan.
- c. Dalam Bidang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban, secara umum Provinsi Kalimantan Timur berada dalam situasi yang kondusif, meskipun di beberapa daerah ada riak-riak kecil yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan tetap kondusif dan terkendalinya stabilitas ketertiban umum di wilayah Kalimantan Timur adalah peran aktif forum-forum seperti; Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
- d. Dalam Bidang Hukum dan Demokrasi, terjadi kemajuan yang cukup signifikan dari masyarakat Kalimantan Timur,

dimana nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Timur yang sebelumnya memperoleh nilai 66,37 peringkat ke-17 Nasional, menjadi 71,23 peringkat ke-8 Nasional.

### **1.3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- Masih rendahnya pemahaman Ormas, LSM, OKP dan organisasi lainnya dalam menindaklanjuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam rangka penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sehingga tidak semua masyarakat tahu akan informasi pembangunan daerah.
- Penataan Administrasi Kependudukan masih menghadapi kendala optimalisasi perekaman KTP-elektronik, selain itu masih rendahnya keadaran masyarakat terutama didaerah pedalaman dan daerah yang sulit dijangkau akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan sebagai identitas diri yang dilindungi oleh Undang-Undang.

#### **b. Solusi**

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan di bidang politik, nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, dan cinta tanah air di perbatasan, serta administrasi kependudukan.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penyampaian informasi publik sehingga informasi pembangunan daerah dan transparansinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, seperti ruang kerja yang cukup representatif, aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyiapan jaringan/ bandwidth TIK;

## 2. Prioritas 10 : Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

### 2.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 10; Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal adalah melalui pelaksanaan 9 program dan 24 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363,84 Milyar.

Tabel 4.3 Program Kegiatan Prioritas terkait Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

Prioritas 10 : Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal			
No	Program / Kegiatan		SKPD
1	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL
	1.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan	
	1.2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan	
2	Program pembangunan jalan dan jembatan		DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)
	2.1	Pembangunan Jalan Long Bagun-Long Pahangai	
	2.2	Pembangunan Jembatan Long Bagun – Long Pahangai	
	2.3	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Mahak Baru – S. Barang	
	2.4	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan S. Pengian – Long Nawang – Long Apung – Sei Barang	
	2.5	Pembangunan jalan batas negara – s.Pengian-L.Nawang-L.Ampung-Sei Barang	

	2.6	Pembangunan jalan Mahak baru – sei.Barang	DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)
	2.7	Pembangunan jembatan ruas jalan lingkar P.Nunukan	
	2.8	Pembangunan Jalan Lingkar P. Nunukan	
	2.9	Pembangunan Jalan Long Bawan – Long Layu – Binuang	
3	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		DINAS PERHUBUNGAN
	3.2	Pembangunan Bandar Udara Long Apung Malinau	
	3.3	Pembangunan Bandar Udara Long Bawan Nunukan	
	3.4	Pembangunan Bandar Udara Maratua	
	3.5	Peningkatan Bandar Udara Datah Dawai	
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	4.1	Pengembangan sarana telekomunikasi	
5	Program Perencanaan Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informasi		
	5.1	Cell Plan Menara Telekomunikasi	
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		KESBANGPOL
	6.1	Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Daerah Perbatasan	
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		BIRO PERBATASAN, PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA
	7.1	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	
	7.2	Inventarisasi dan penamaan pulau-pulau yang belum bernama di Kaltim	
8	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		DINAS SOSIAL
	8.1	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	
	8.2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	
9	Program Pembangunan Sarana Kesehatan		DINAS KESEHATAN (Kabupaten/Kota melalui Bantuan Keuangan Provinsi)
	9.1	Puskesmas 24 Jam Lumbis Ogong, Sembakung	
	9.2	Puskesmas 24 Jam Long Alango, long sule, Pulau Sapi, Sungai Boh	

## **2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 10; Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 97,68 %.

Pencapaian target prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal pada Tahun 2013 antara lain :

- a. Meningkatnya akses informasi dengan terbangunnya menara telekomunikasi sebanyak 4 Tower di kawasan perbatasan di Kutai Barat (Long Apari), Nunukan (Long Layu), dan Malinau (Desa Agung Baru dan Long Nawang) yang telah dilaksanakan secara swakelola dengan pihak TNI, dan bekerjasama dengan TVRI Kalimantan Timur dan RRI Samarinda dalam menyediakan sarana sewa satelit untuk menunjang kegiatan TVRI dan RRI agar dapat diakses oleh masyarakat di daerah perbatasan.
- b. Pengamanan pulau-pulau terluar melalui Inventarisasi dan Penamaan pulau-pulau serta Pemasangan Tugu Nama Pulau.
- c. Meningkatnya akses transportasi barang dan jasa dengan terbangunnya dan ditingkatkannya beberapa ruas jalan dan jembatan, dan pengembangan bandara di Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal antara lain:
  - Ruas Jalan Batas Negara – Sei. Pengian – Long Nawang – Long Apung – Sungai Barang – Mahak Baru sepanjang 131,65 Km, telah terbangun dengan konstruksi agregat C/S sepanjang 112,65 Km dan sisa tanah menjadi 19,00 Km.

- Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan meliputi ruas; Jalan Long Bagun - Long Pahangai 20,0 km (Tanah); Jembatan Long Bagun – Long Pahangai 60,0 m; Jembatan Ruas Jalan Mahak Baru – Sei Barang 60,0 m; Jembatan Ruas Jalan S.Pengian – Long Nawang – Long Apung – Sei Barang 60,0 m (Rangka); Jalan Batas Negara – S.Pengian - Long Nawang – Long Apung - Sei Barang 4,40 km (Agregat); Jalan Mahak baru – Sei Barang 20,0 km (Agregat); Jembatan ruas jalan lingkar P.Nunukan 40,0 m (Girder); Jalan Lingkar P.Nunukan 3,00 (Agregat); Jalan Long Bawan – Long Layu– Binuang 20,0 km (Tanah);
- Peningkatan dan Pembangunan Bandar Udara meliputi; Bandar Udara Long Apung Malinau (Perpanjangan landasan pacu 1.020 meter, Perpanjangan R/W P 200 x L 30 m, Pembuatan box culvert 361,03 m<sup>3</sup>, Pekerjaan konstruksi perpanjangan R/W P 150 m x L 30 m); Bandar Udara Long Bawan Nunukan (Perpanjangan landasan pacu menjadi 1.600 meter, Pekerjaan Lanjutan perpanjangan R/W P 100 x L 30, Pekerjaan double Turning Area 04 900 m<sup>2</sup>, Pekerjaan marking 1.213,69 m<sup>2</sup>, Pekerjaan pelebaran R/W existing dan lebar 7 x 1.205 m, Pekerjaan overlay ATB R/W existing P 780 x L 30 m); Bandar Udara Maratua (Lanjutan perpanjangan R/W dengan Konstruksi Granular Base Course (GBS) 1.040 x 32 m); Bandar Udara Datar Dawai (Perpanjangan landasan pacu 1.490 meter, Perpanjangan R/W 1.490 x 30; pemotongan bukit 550.000 m<sup>3</sup>). Tiga bandara tersebut saat ini telah dapat didarati dengan



menggunakan pesawat ATR-42. Selain itu juga telah selesai dibangun terminal penumpang bandara Malinau dan Nunukan yang representatif.

- d. Meningkatnya akses pendidikan di daerah perbatasan, melalui bantuan beasiswa pendidikan kepada pemuda perbatasan usia sekolah di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp 1 Miliar. Kemudian alokasi beasiswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Kab. Malinau sebesar Rp 2 Miliar.
- e. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah pedalaman, terpencil dan perbatasan, melalui upaya peningkatan pelayanan Puskesmas 24 jam di 2 Puskesmas Kawasan Perbatasan dan Pengobatan massal di 6 (enam) lokasi Kabupaten Perbatasan Malinau dan Kabupaten Nunukan yaitu Lumbis Ogong, Sembakung, Long Alango, long sule, Pulau Sapi, Sungai Boh.
- f. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui pembinaan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT) terhadap 37 KK di Desa Paking Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, 70 KK di Desa Pulau Keras Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, dan 60 KK di Desa Tembangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.

## **2.3. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

- Kerawanan terhadap disintegrasi bangsa yang ditandai dengan menurunnya nasionalisme dan kesadaran politik berbangsa bagi masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan.

- Masih belum tuntasnya penanganan pencurian sumber daya alam dari aktivitas *illegal logging*, *illegal trading*, *illegal trafficking* dan *illegal fishing*.
- Pembangunan di kawasan pedalaman dan perbatasan belum mencapai target yang diharapkan karena masih menghadapi kendala biaya mobilisasi yang sangat mahal, keterbatasan bahan bangunan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), lahan yang berstatus kawasan hutan dan kawasan lindung, kegiatan ekonomi yang berjalan lambat karena belum optimalnya pengembangan potensi lokal dan belum didukung dengan lembaga keuangan.
- Pengelolaan kawasan perbatasan masih bersifat sektoral karena lembaga yang mengelola kawasan perbatasan pada tingkat nasional belum berjalan efektif. Sementara itu forum-forum kerja bilateral seperti GBC, JBC, Sosek Malindo, bersifat Adhoc sehingga kurang terintegrasi.

#### **b. Solusi**

- Percepatan penyelesaian pelepasan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman dan perbatasan.
- Mendorong kemandirian masyarakat di perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal melalui pengembangan ekonomi lokal melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat.
- Keterpaduan rencana pusat dan rencana daerah dan diarahkan pada kerangka sistem pembangunan

kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal yang berkesinambungan.

- Mendorong pengembangan kewirausahaan dan pendampingan usaha mikro dan kecil , dan lembaga keuangan di perbatasan.
- Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan akselerasi pengembangan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya Alam Lokal untuk pembangunan serta konsistensi pembiayaan pembangunan.

## **Agenda 2 :**

### **Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat**

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, Pemerintah Provinsi berupaya untuk merubah struktur ekonomi yang bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan mengembangkan beberapa kawasan andalan/ industri untuk dijadikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Upaya tersebut telah menampakkan hasilnya, dengan ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Provinsi Riau dan Sumatera Utara berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 sebagai Cluster Industri berbasis Pertanian, Oleochemical di Kawasan Maloy Kutai Timur dan bersama Provinsi Jawa Timur sebagai Cluster Industri berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang. Disamping itu, di Kota Balikpapan juga telah dikembangkan Kawasan Industri Kariangau. Ketiga kawasan industri tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, dan dapat memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimana Provinsi Kalimantan Timur menjadi bagian dari Koridor Ekonomi Kalimantan. Salah satu dukungan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan cluster tersebut adalah penetapan jalan tol Balikpapan–Samarinda dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebagai jalan lintas Kalimantan Koridor Ekonomi Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 567/KPTS/M/2010.

Pengembangan cluster industri telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 26 Tahun 2008) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam proses pengesahan menjadi Peraturan Daerah.

Capaian Agenda 2 pembangunan di Kalimantan Timur meliputi pencapaian Prioritas 1 Ketahanan dan Kemandirian Pangan, Prioritas 4; Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/Kewirausahaan/Pengembangan Sektor Riil/UMKM, Prioritas 6; Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Prioritas 7; Peningkatan Daya Saing dan Investasi, Prioritas 9; Pembangunan Infrastruktur.

## **1. Prioritas 4 : Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/Kewirausahaan/ Pengembangan Sektor Riil/UMKM**

### **1.1. Program dan Kegiatan**

Upaya pencapaian prioritas 4: Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/Kewirausahaan/Pengembangan Sektor Riil/UMKM adalah melalui pelaksanaan 2 program dan 2 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,14 Milyar.

Tabel 4.4 Program Kegiatan Prioritas  
terkait Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/Kewirausahaan/  
Pengembangan Sektor Riil/UMKM

<b>Prioritas 4 : Pemberdayaan Ekonomi Rakyat / Kewirausahaan / Pengembangan Sektor Riil / UMKM</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>SKPD</b>
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM</b>
	1,1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	
	2,1 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi	

## 1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 4: Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/ Kewirausahaan/Pengembangan Sektor Riil/UMKM pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 94,5 %.

Beberapa capaian hasil pembangunan Prioritas 4 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/ Kewirausahaan/ Pengembangan Sektor Riil / UMKM, antara lain :

- a. Walaupun terjadi penurunan jumlah koperasi sebesar 3,6 % dan penurunan jumlah anggota koperasi sebesar 5,57 %, Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi pada Tahun 2013. Status ini dicapai dikarenakan lebih dari separuh kabupaten/kota di Kalimantan Timur telah menjadi Kabupaten/Kota penggerak koperasi, dan Kalimantan Timur memiliki koperasi aktif sebesar 75% dan koperasi berkualitas sebesar 55%. Untuk pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sampai dengan Tahun 2013 telah di salurkan dana bantuan kredit dari Bank Kalimantan Timur kepada kelompok-kelompok usaha sebesar Rp. 3,657 Trilyun bagi 167.960 debitur untuk kredit pengembangan

UMKM dan kredit padi sejahtera, sawit sejahtera, keramba sejahtera, ternak sejahtera.

- b. Capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan pada Tahun 2012 mencapai 2,413 Trilyun rupiah menjadi sebesar 3,657 Trilyun rupiah pada Tahun 2013 dengan jumlah debitur sebanyak 167.960 orang. Kenaikan ini merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung menunjang peningkatan ekonomi Kalimantan Timur.
- c. Penghargaan Produktivitas Sidhakarya tingkat provinsi terhadap 22 UKM yang telah menunjukkan kinerja unggul diserahkan oleh bapak Gubernur pada hari ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur dan Penghargaan Produktivitas Paramakarya tingkat nasional diserahkan oleh Presiden RI dan Pembentukan Desa Produktif sebanyak 9 desa setiap desa 15 sampai 20 orang.

### **1.3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- Pembentukan PT.JAMKRIDA Kalimantan Timur belum operasional karena belum keluar ijin dari Kementerian Hukum dan HAM.
- Masih kurangnya bantuan kredit dari perbankan karena persyaratan-persyaratan dan jaminan yang dimiliki UMKM tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam perbankan (sulitnya akses kredit perbankan).
- Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM Pelaku UMKM.

- Kurangnya kemampuan anggota dan pengguna koperasi untuk menumbuhkan kemampuan modal sendiri.
- Diversifikasi usaha masih rendah termasuk rendahnya mutu dan kemasan produk.
- Pengenalan masyarakat terhadap produk UMKM Masih rendah
- Sebagian besar koperasi belum melaksanakan RAT.
- Belum adanya pemetaan sentra produk unggulan.
- Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi.
- Kesadaran masyarakat tentang perkoperasian masih rendah.
- Masih kurangnya sekolah yang memiliki koperasi sekolah.
- Daya saing UKM rendah.
- Kurang optimal kemitraan KUKM dengan pengusaha besar.
- Kurang optimalnya pengembangan Wira Usaha Baru.
- Belum adanya koperasi unggulan perjenis koperasi hanya ada 4 jenis koperasi (produksi, konsumen, simpan pinjam dan jasa).

**b. Solusi**

- Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi di tiap Kabupaten/Kota dan memotivasi Kabupaten/Kota agar segera mengusulkan daerahnya menjadi Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, diantaranya dengan meningkatkan pelaksanaan RAT Koperasi sebagai wujud dari keaktifan koperasi dengan target minimal sebesar 75% dan menjadikan koperasi yang berkualitas minimal sebesar 55%.

- Simulasi pembentukan PT. Jamkrida Kalimantan Timur dan pembuatan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota untuk wadah penyertaan ke PT. Jamkrida. Pengangkatan tenaga pendamping Koperasi dan UMKM yang akan di tempatkan di Kabupaten/ Kota sebagai fasilitator untuk pemecahan masalah yang di hadapi Koperasi dan UMKM.
- Revitalisasi Program sertifikasi Hak atas tanah untuk meningkatkan jumlah UMKM yang di fasilitasi pengurusan sertifikasi tanah melalui konsolidasi dengan Dinas Kabupaten/ Kota, Kanwil/ Badan Pertanahan dan Pemerintah Provinsi.

## 2. Prioritas 6: Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

### 2.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 6: Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah melalui pelaksanaan 4 program dan 9 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,85 Milyar.

Tabel 4.5 Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Prioritas 6 : Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Lingkungan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	1,1	Pelaksanaan Penilaian Proper dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan Jasa	
2	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup		



	2,1	Rehabilitasi Hutan Mangrove	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	2,2	Pengawasan dan Pengendalian LH di Sektor Pertambangan	
	2,3	Penanganan Kasus Lingkungan	
	2,4	Penanganan Konflik antara Manusia dan Gajah serta Orang Utan	
	2,5	Pengelolaan Habitat Gajah dan Orang Utan	
	2,6	Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi SDA dan Kawasan Karst	
3	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	3,1	Penyusunan Perda PPLH, Perda Pengendalian Pencemaran Udara, Perda Pengolahan Limbah B3, Revitalisasi Amdal dan KLHS	
4	Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan Hidup		
	4,1	Pengembangan Sistem Database SILH dan SLHD secara Online	

## 2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 6: Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 70,56%.

Beberapa capaian hasil pembangunan Prioritas 6 Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain :

- a. Penilaian kinerja perusahaan Industri dan Jasa (proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup, telah dilakukan penilaian pada Tahun 2013 sebanyak 35 perusahaan Industri dan Jasa dengan perolehan 6 emas, 6 hijau, 21 biru dan 2 merah. Sedangkan pertambangan batubara (proper) telah dilakukan penilaian 70 perusahaan dengan perolehan 4 emas, 31 hijau, 26 biru dan 9 merah. Untuk penilaian kinerja di 7 perusahaan HPHTI/IUPHHK-HT, dengan perolehan 2 emas, 2 hijau dan 3 biru. Untuk penilaian kinerja perusahaan HPH/IUPHHK-HA sebanyak

6 perusahaan dengan perolehan 4 Biru dan 2 Hijau serta Proper selanjutnya adalah Industri Pengolahan Kelapa Sawit yang telah dilakukan penilaian 22 perusahaan dengan perolehan 9 hijau dan 12 biru dan 1 Merah.

- b. Pada penyelenggaraan Pekan Lingkungan Indonesia pada Tahun 2013, Kalimantan Timur sukses menjadi juara umum nasional.
- c. Dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam 5 (lima) Tahun terakhir dari Tahun 2009 s/d 2013 telah diterbitkan 64 (enam puluh empat) Izin Lingkungan atau yang dipersamakan dengan Izin Lingkungan (Rekomendasi UKL-UPL, SK Kelayakan Lingkungan), oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan rincian 52 Untuk kegiatan skala AMDAL dan 12 untuk kegiatan skala UKL-UPL
- d. Penghargaan Adipura pada Tahun 2013 Kota Balikpapan dan Kota Bontang meraih Anugerah Adipura Kencana (Trophy Emas), Tarakan dan Penajam Paser Utara meraih anugerah Adipura yang diberikan oleh Presiden RI. Kota Samarinda dan Kutai Timur Tahun 2013 diberi penghargaan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI berupa Piagam atau Sertifikat Adipura.
- e. Penghargaan lingkungan Kalpataru dari Presiden RI yang telah dicapai oleh Kalimantan Timur Tahun 2013 diraih Drs. H. Arbain (Balikpapan) kategori Pengabdian Lingkungan. Penghargaan sekolah Adiwiyata yang ada di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013, penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri (Diserahkan oleh presiden) sebanyak 15 sekolah (Balikpapan 6, Samarinda 1, Bulungan 1, Tarakan 2, Kutai Timur 5), Sekolah Adiwiyata Nasional (Diserahkan

oleh Menteri Lingkungan Hidup) sebanyak 25 sekolah (Samarinda 3, Balikpapan 10, Bontang 2, Tanah Grogot 2, Berau 2, Kutim 1, Tarakan 3, Nunukan 2), Tingkat provinsi (diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur) sebanyak 102 sekolah (13 Kab/Kota tidak termasuk Kab. Tana Tidung).

### **2.3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai, luas wilayah Kalimantan Timur dan banyaknya jumlah Perusahaan Tambang, Perkebunan HPH, HTI dan Industri serta Pabrik pengolahan kelapa sawit yang berpotensi mencemari Lingkungan memerlukan banyak Pegawai dan Pengawas/PPLHD yang ditugasi ke lapangan untuk memastikan pengendalian pencemaran.

#### **b. Solusi**

Solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi saat ini adalah peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia pengawas/PPLHD Provinsi Kalimantan Timur.

### **3. Prioritas 7 : Peningkatan Daya Saing dan Investasi**

#### **3.1. Program dan Kegiatan**

Upaya pencapaian prioritas 7: Peningkatan Daya Saing dan Investasi adalah melalui pelaksanaan 9 program dan 25 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,32 Trilyun.

Tabel 4.6 Program Kegiatan Prioritas  
terkait Peningkatan Daya Saing dan Investasi

Prioritas 7 : Peningkatan Daya saing dan Investasi		
No	Program / Kegiatan	SKPD
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH</b>
1.1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	
1.2	Penyelenggaraan Pameran Investasi	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	
2.1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di Bidang Investasi	
2.2	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	
2.3	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	
<b>3</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>
3.1	Kajian potensi sumberdaya investasi	
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>
4.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	
<b>5</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	
5.1	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	
5.2	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	
5.3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	
5.4	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	
5.5	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	
5.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	
5.7	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	
<b>6</b>	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	
6.1	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	
6.2	Pembangunan jembatan Sungai Wain sisi kiri	
6.3	Pembangunan Jalan Batu Cermin - Sungai Siring	
6.4	Pembangunan Jalan Km.13- pelabuhan Kariangau	
6.5	Pembangunan jembatan p.Balang bentang pendek (400 m)	
6.6	Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	
6.7	Pembangunan jalan Samarinda - Sanga-Sanga (TPK Palaran)	

	6.8	Pembangunan Jembatan Kembar Samarinda	DINAS PEKERJAAN UMUM
	6.9	Pembangunan Jalan Ramp 3 dan 4 Km.13 - Pelabuhan Kariangau	
7	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		DINAS PERHUBUNGAN
	7.1	Pembangunan Bandar Udara Juwata Tarakan	
	7.2	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	
	7.3	Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau	
	7.4	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kab. Kutai Timur	
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	8.1	Pusat Layanan Informasi	
9	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa		
	9.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	

### 3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 7: Peningkatan Daya Saing dan Investasi pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 93,28%.

Beberapa capaian hasil pembangunan Prioritas 7 Peningkatan Daya Saing dan Investasi, antara lain :

- a. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurun sebesar 0,55% dan mencapai US\$ 1.385.409.000 (Kurs Dollar Tahun 2013 Rp. 9.600,-) dengan menyerap 70.446 Tenaga Kerja Indonesia dan 561 Tenaga Kerja Asing meliputi 351 Proyek. Sedangkan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDN) meningkat sebesar 2,39%. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDN) mencapai Rp. 18.411.377.300.000,- dan memiliki 36.552 TKI, meliputi 103 proyek. Pencapaian realisasi investasi Kalimantan Timur di bidang investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kalimantan Timur peringkat Penanaman

Modal Asing (PMA) ada di urutan ke-6 setelah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Papua. Sedangkan di bidang investasi Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDN), Kalimantan Timur berada di urutan ke-2 setelah Jawa Timur.

- b. Bidang Komunikasi dan Informatika berperan dalam mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat, telah dilaksanakan pembangunan antara lain; serta komunikasi publik melalui dialog interaktif di TVRI dan RRI baik dalam daerah maupun nasional; Pembangunan Warung Informasi Etam Kalimantan Timur (WIEK) sebagai wadah komunitas media dan TIK serta media center; Peningkatan pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa dengan kegiatan sewa peralatan call center dan contact center. Sampai saat ini, manfaat bidang Komunikasi dan Informatika semakin terasa bagi masyarakat karena kualitas dan kapasitas jaringan serta perangkat komunikasi dan informasi semakin meningkat dan berkurangnya daerah blank spot.
- c. Pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus bagi pengembangan investasi untuk menarik investor, antara lain:
  - Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang 3,00 km (Tanah),
  - Pembangunan Jembatan Sungai Wain sisi kiri 60,0 m (Rangka),
  - Pembangunan Jalan Batu Cermin - Sungai Siring 0,8 km (Tanah),
  - Pembangunan Jalan Km.13 - pelabuhan Kariangau 1,65 km (Rigid),

- Pembangunan Jembatan P.Balang bentang pendek (400 m) 5,0 km (Rigid),
  - Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda 400m (Rangka),
  - Pembangunan Jalan Samarinda - Sanga-Sanga (TPK Palaran) 0,30 km (Rigid),
  - Pembangunan Jembatan Kembar Samarinda 5,0 km (Rigid),
  - Pembangunan Jalan Ramp 3 dan 4 Km.13 - Pelabuhan Kariangau 0,30 km (Rigid).
- d. Percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi Peraturan Daerah Provinsi sebagai acuan penerbitan perijinan lokasi untuk pengembangan investasi, antara lain:
- Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Rencana Tata Ruang (Materi Teknis 2 RTR KSP).
  - Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (Penyelesaian 3 Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)).
  - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (SK Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kawasan Hutan pada Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)).

### **3.3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- Menurunnya investasi disebabkan oleh menurunnya daya saing ekonomi akibat pengaruh isu lingkungan global terutama pada produk primer seperti batubara dan kelapa sawit.

- Keterbatasan infrastruktur pada kawasan-kawasan yang dipromosikan untuk pengembangan investasi.
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan yang sebagian besar berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan.
- Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang berpengaruh pada ketidakjelasan status lahan sehingga menyebabkan menurunnya minat investor.

#### **b. Solusi**

- Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menjadi Peraturan Daerah.
- Meningkatkan kompetensi Angkatan Kerja Daerah.
- Meningkatkan akses melalui pengembangan infrastruktur di kawasan yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- Revitalisasi sistem pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang memberikan nilai kualitas produk yang tinggi, sehingga produk primer unggulan daerah yang diekspor dapat memiliki daya saing yang tinggi.

### **4. Prioritas 9 : Pembangunan Infrastruktur**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Upaya pencapaian prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur adalah melalui pelaksanaan 16 program dan 130 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,01 Trilyun.



Tabel 4.7 Program Kegiatan Prioritas  
terkait Pembangunan Infrastruktur

Prioritas 9 : Pembangunan Infrastruktur			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program pembangunan jalan dan jembatan		DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)
	1.1	Pembangunan Jalan Rapak Indah	
	1.2	Pembangunan Jalan Jakarta	
	1.3	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	
	1.4	Pembangunan jembatan Sungai Wain sisi kiri	
	1.5	Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Bengkal	
	1.6	Pembangunan Jalan Sp. Barong Tongkok - Sekolak Darat - Mentiwan	
	1.7	Pembangunan Jalan Barong Tongkok - Tering	
	1.8	Pembangunan Jalan Muara Bengkal - Sp. Batu Ampar	
	1.9	Pembangunan Jalan Ring Road Tj Redeb - Teluk Bayur	
	1.10	Pembangunan Jalan Sp. Tanah Kuning - Tanjung Batu	
	1.11	Pembangunan Jembatan Sangkulirang-Batu Lepok-Talisayan	
	1.12	Pembangunan Jalan Outter Ring Road Jembatan Mahulu- Jakarta - M.Said	
	1.13	Pembangunan Jalan Long Bagun- Long Pahangai	
	1.14	Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai	
	1.15	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Mahak Baru - S. Barang	
	1.16	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan S. Pengian - Long Nawang - Long Apung - Sei Barang	
	1.17	Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy	
	1.18	Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq - SP. Abit - Kahala Kota Bangun	
	1.19	Pembangunan Jalan Batu Cermin - Sungai Siring	
	1.20	Pembangunan Jalan Gotong Royong	
	1.21	Pembangunan Jalan Palaran - Sanga-sanga	

	1.22	Pembangunan Jalan Km.13- pelabuhan Kariangau	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)</b>
	1.23	Pembangunan jalan Suaran - Mantaritif	
	1.24	Pembangunan jalan batas negara - s.Pengian-L.Nawang-L.Apung-Sei Barang	
	1.25	Pembangunan jalan Mahak baru - sei.Barang	
	1.26	Pembangunan jembatan ruas jalan lingkar P.Nunukan	
	1.27	Pembangunan jembatan p.Balang bentang pendek (400 m)	
	1.28	Pembangunan Jalan Rifadin - Jembatan Mahulu	
	1.29	Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	
	1.30	Pembangunan Jalan Talisayan - Batu Lepok	
	1.31	Pembebasan Lahan Tol dan Lahan Non Tol	
	1.32	Pembangunan Jalan Gusiq-SP Blusuh	
	1.33	Pembangunan Jalan Sangkulirang - Batu Lepok 1	
	1.34	Pembangunan Jalan Sangkulirang - Batu Lepok 2	
	1.35	Pembangunan Jalan Ardan	
	1.36	Pembangunan jalan Samarinda - Sanga-Sanga (TPK Palaran)	
	1.37	Pembangunan Jalan Batu Cermin (Sempaja) - Tenggarong Seberang	
	1.38	Pembangunan Jembatan Kembar Samarinda	
	1.39	Pembangunan Jalan Ramp 3 dan 4 Km.13 - Pelabuhan Kariangau	
	1.40	Pembangunan Jalan Lingkar P. Nunukan	
	1.41	Pembangunan Jembatan Kehewan	
	1.42	Pembangunan Jalan Long Bawan - Long Layu - Binuang	
	1.43	Pembangunan Jalan Akses Perumahan KORPRI Bukit Pinang	
<b>2</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>		
	2.1	Rehabilitasi Jalan Balikpapan - Samboja	
	2.2	Rehabilitasi Jalan Tanah Grogot - Pondong	
	2.3	Rehabilitasi Jalan Suryanata (SAMARINDA - KUKAR)	

	2.4	Rehabilitasi Jl. Km 38 - Semoi - Sepaku	DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)
	2.5	Rehabilitasi Jalan Simpang Samboja - Simpang Muara Jawa	
	2.6	Pemeliharaan Jalan Samarinda - Anggana	
	2.7	Pemeliharaan Jalan Sebulu - Ma. Kaman	
	2.8	Pemeliharaan Jalan Samarinda - Simpang Embalut	
	2.9	Pemeliharaan Jalan Sanga-Sanga - Dondang	
	2.10	Pemeliharaan Jalan Simpang Embalut - Sebulu	
	2.11	Pemeliharaan Jalan Bentuas - Noni - Sanga-Sanga	
	2.12	Pemeliharaan Jalan Arah Simpang Embalut	
	2.13	Pemeliharaan Jalan Simpang Bentuas - Simpang Muara Jawa	
	2.14	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	
	2.15	Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok - Melak	
	2.16	Pemeliharaan Jalan Sp. Barong Tongkok - Simpang 3 Damai	
	2.17	Pemeliharaan Jalan Km 5,5 Balikpapan - Kariangau	
	2.18	Pemeliharaan Jalan Tanjung Redeb - Talisayan	
	2.19	Pemeliharaan Jalan Simpang Blusuh - Damai	
	2.20	Pemeliharaan Jalan Jakarta 1	
	2.21	Pemeliharaan jalan di kota Samarinda	
	2.22	Pemeliharaan jalan Harun Nafsi - H.M.Rifaddin	
	2.23	Pemeliharaan jembatan (tersebar se-Kaltim)	
	2.24	Rehabilitasi Jalan Sp. Patung Lembuswana - Sebulu	
	2.25	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan	
	2.26	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah tengah	
	2.27	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah timur	
	2.28	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah utara	
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		
	3.1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	

	3.2	Perencanaan pembangunan reservoir	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)</b>
	3.3	Perencanaan normalisasi saluran sungai	
	3.4	Pembangunan reservoir	
	3.5	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Bendungan Marangkayu	
	3.6	Pembangunan Jaringan Tata Air Daerah Rawa Di. Labanan Di. Biatan dan Di Semurut	
	3.7	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten pasir	
	3.8	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kota Samarinda	
	3.9	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara I	
	3.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara II	
	3.11	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai timur	
	3.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Berau	
	3.13	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Bulungan	
	3.14	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Malinau	
	3.15	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Nunukan	
<b>4</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>		
	4.1	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
	4.2	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	
<b>5</b>	<b>Program Pengendalian Banjir</b>		
	5.1	Pembangunan reservoir pengendali banjir	
	5.2	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Karang asam kecil	
	5.3	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali (Loa Janan dan Samarinda seberang ; Sungai buluh)	
	5.4	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir (Loa Janan dan Samarinda seberang ; Sungai buluh)	

	5.5	Pembangunan prasarana pengaman pantai (Loa Janan dan Samarinda seberang ; Sungai buluh)	DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)
6	Program pembangunan turap/talud/bronjong		
	6.1	Penanganan Longsoran Km.13 - Pelabuhan Kariangau	
	6.2	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata	
	6.3	Penanganan Longsoran se kaltim	
	6.4	Penanganan Longsoran Jalan Gajah Mada Samarinda	
7	Program Pengembangan Perumahan		
	7.1	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	
	7.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	
	7.3	Pembangunan Rumah Korban Bencana	
	7.4	Perencanaan dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	
8	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
	8.1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
	9.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	
	9.2	Pengembangan sistem distribusi air minum	
10	Program Peningkatan Pelayanan Publik		
	10.1	Pembangunan Convention Hall	
	10.2	Pembangunan Pasar Tradisional	
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	11.1	Pembangunan Gedung VVIP Room Bandara	
	11.2	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor (Kantor Gubernur. Rumah Jabatan Wagub)	
	11.3	Pembangunan gedung kantor	
	11.4	Pembangunan Guest House Pemprov Kaltim	
12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		
	12.1	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	

	12.2	Pembangunan Gerbang Kawasan Maloy	
<b>13</b>	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>		
	13.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana SDP	
<b>14</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>		
	14.1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
	14.2	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
	14.3	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan udara	
<b>15</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>		
	15.1	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	
	15.2	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	
	15.3	Pengadaan marka jalan	
	15.4	Pengadaan pagar pengaman jalan	
<b>16</b>	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>		
	16.1	Pembangunan Bandar Udara Juwata Tarakan	
	16.2	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	
	16.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana SDP	
	16.4	Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau	
	16.5	Pembangunan Bandar Udara Long Apung Malinau	
	16.6	Pembangunan Bandar Udara Long Bawan Nunukan	
	16.7	Pembangunan Bandar Udara Maratua	
	16.8	Peningkatan Bandar Udara Datar Dawai	
	16.9	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kab. Kutai Timur	
	16.10	Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Samarinda Baru	

**DINAS PERHUBUNGAN  
(DISHUB)**

## 4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 95,76%.

Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan dalam rangka mendukung pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur. Capaian hasil pembangunan infrastruktur antara lain:

- a. Kondisi mantap jalan nasional Tahun 2013 mencapai 89,92% naik bila dibandingkan Tahun 2012 sebesar 86,79%. Perkembangan jenis permukaan aspal meningkat 0,87%, dari Tahun 2012 sepanjang 1.797,69 Km atau 84,87% menjadi sepanjang 1.816,06 Km atau 85,74% pada Tahun 2013. Dengan kondisi ini mampu meningkatkan pelayanan jaringan jalan untuk memobilisasi barang dan jasa terutama pada laur-laur menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membangun beberapa jalan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis provinsi dengan kapasitas diatas 10 Ton antara lain ruas jalan Km 13 Kariangau – TPK Kariangau, Jalan Akses Pulau Balang, Jalan Dalam Kawasan Maloy, Jalan Outer Ring Road Jembatan Mahulu – Jakarta – M. Said dan Penuntasan Jalan Jakarta.
- b. Penanganan kerusakan yang terjadi melalui peningkatan kualitas dan struktur jalan beberapa ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan yaitu Rehabilitasi Jalan Balikpapan – Samboja, Jalan Tanah Grogot – Pondong, Jalan Suryanata (SAMARINDA - KUKAR), Jalan Km 38 - Semoi – Sepaku, Jalan Simpang Samboja - Simpang Muara

Jawa, Jalan Samarinda – Anggana, Jalan Sebulu - Ma. Kaman, Jalan Samarinda - Simpang Embalut, Jalan Sanga-Sanga – Dondang, Jalan Simpang Embalut – Sebulu, Jalan Bentuas - Noni - Sanga-Sanga, Jalan Arah Simpang Embalut, Jalan Simpang Bentuas - Simpang Muara Jawa, Jalan Barong Tongkok – Melak, Jalan Sp. Barong Tongkok - Simpang 3 Damai, Jalan Km 5,5 Balikpapan – Kariangau, Jalan Tanjung Redeb – Talisayan, Jalan Simpang Blusuh – Damai, Jalan Jakarta 1, Jalan di kota Samarinda, Jalan Harun Nafsi - H.M.Rifaddin, Jalan Sp. Patung Lembuswana – Sebulu.

- c. Penanganan kerusakan dengan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas melalui peningkatan kondisi menjadi permukaan aspal/rigid pavement, pemeliharaan dan penanganan longsor beberapa ruas jalan Provinsi yang mengalami kerusakan yaitu; Penanganan Longsor jalan Km.13 - Pelabuhan Kariangau, Jalan Pangeran Suryanata, Jalan Gajah Mada Samarinda.
- d. Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang merupakan bagian dari jalan lintas Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilaksanakan pembangunannya mulai Tahun 2007 dengan dana APBD provinsi, dan hingga bulan Desember 2013 progresnya telah mencapai 80,00% untuk bentang pendek (diperkirakan selesai pada akhir Tahun 2015). Sedangkan pembangunan Jembatan Pulau Balang bentang panjang pada Tahun 2013 dibiayai oleh dana APBN dengan progres baru mencapai 6,78 %,dan dalam proses pemenuhan persyaratan untuk dibiayai melalui pola Multiyears Contract APBN Tahun anggaran 2014 – 2019 oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Jembatan Pulau Balang mampu memperpendek jarak



waktu dan dari Kota Balikpapan menuju Kabupaten Penajam yang merupakan akses menuju wilayah selatan Provinsi Kalimantan Timur hingga ke perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu jembatan memiliki peran strategis untuk interkoneksi antar Jalan Tol – Terminal Peti Kemas Kawasan Industri Kariangau (outlet Pelabuhan) – Outlet Bandar Udara Sepinggian dan Rencana Outer Ring Road Balikpapan.

- e. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda panjang 99,20 Km telah dilaksanakan pembangunannya yang dibagi 5 segmen dengan progres sampai dengan Tahun 2013 mencapai panjang 50,04 Km (pekerjaan tanah/badan jalan) atau sebesar 50,44% yaitu : segmen I Km.13 Balikpapan – Samboja progress sepanjang 15,40 Km atau sebesar 65,12%, segmen II Samboja – Palaran I progres sepanjang 4,10 Km atau sebesar 15,10%, segmen III Samboja Palaran II progress sepanjang 14,95 Km atau sebesar 68,85%, segmen IV Palaran – Jembatan Mahkota II sepanjang 10,30 Km atau sebesar 52,62%, dan segmen V Km.13 – Sepinggian Balikpapan progres sepanjang 5,29 Km atau sebesar 27,42%. Dengan terbangunya jalan Tol ini diharapkan mampu memberikan kemudahan aksesibilitas antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN ) Kota Samarinda - Kota Balikpapan (menuju Outlet Bandara), serta mengurangi waktu tempuh dari 3,4 - 4 jam dengan menggunakan jalur eksisting menjadi 1,5 jam waktu yang direncanakan.
- f. Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam meliputi sebagian pekerjaan pondasi, pilar, dan pengadaan rangka. Sampai dengan akhir Tahun 2013 progres mencapai 33,80% dan diperkirakan akan selesai pada Tahun 2016. Jembatan ini sebagai penghubung antar wilayah dalam

Kota Samarinda sangat penting untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas pada jembatan mahakam I (lama) yang saat ini sudah berlebih dan diperkirakan akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan.

- g. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan di jalan, yang mana dari Tahun ke Tahun kecenderungan trend angka kecelakaan mengalami kenaikan, sehingga langkah strategis yang dilakukan antara lain pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikannya pada Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan. Hasil pembangunan pengadaan rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan dan pengadaan pagar pengaman pada ruas jalan provinsi, meliputi; Pengadaan dan Pemasangan rambu lalu lintas sampai dengan Tahun 2012 yang terpasang pada ruas jalan Provinsi sebanyak 3.299 buah ditambah RPPJ 131 buah; pengadaan marka jalan sepanjang 243.599 m' dan pengadaan pagar pengaman sepanjang 6.529 m'. Pada Tahun 2013 telah teralokasikan rambu sebanyak 850 buah ditambah *traffic cone* 200 buah; marka jalan 42.000 m' dan pagar pengaman sepanjang 2.254 m'.
- h. Pembangunan Terminal Petikemas Kariangau yang telah diresmikan oleh Presiden RI telah beroperasi dengan maksimal dan bahkan diprediksi kurun waktu 5 Tahun kedepan akan overload. Hal ini menunjukkan bahwa peregerakan perdagangan barang yang masuk dan keluar dari dan ke Kalimantan Timur melalui Terminal Peti Kemas Kariangau Balikpapan mengalami angka kenaikan yang cukup signifikan. Dari data menunjukkan bahwa bongkar muat saat ini mencapai 2.83 Milyar MT. Pembangunan TPK

Kariangau Balikpapan dibangun melalui Program PPP (Pelindo, APBN dan APBD Provinsi), dan Tahun 2013 dibangun Gedung Operasional Kalimantan Timur Kariangau Terminal dengan luas bangunan 2.700 m<sup>2</sup>.

- i. Pembangunan Pelabuhan Maloy pada sisi darat yaitu fasilitas perkantoran secara bertahap (Pembangunan Gedung Workshop 425 x 2 m selesai 100%), pembangunan gedung kantor pengelola 44 x 16 m 3 lantai , masjid 16 x 18 m, PMK, pos jaga dan persiapan jalan akses lingkungan (pemasangan paving blok 390 m<sup>2</sup> dan penanaman rumput 100 x 100 m<sup>2</sup>), perencanaan SID dan DED terminal Cargo dan Study Amdal terminal Cargo Pelabuhan Laut Maloy. Sedangkan untuk perencanaan kawasan industri telah disusun study kelayakan, Master Plan, Business plan serta AMDAL dan DED Kawasan Industri Maloy, dan penyusunan FS dan Masterplan tahap II untuk luasan 4.305 Ha. Untuk mendukung pengembangan kawasan, pembangunan Pelabuhan Maloy sisi Perairan dengan alokasi dana APBN yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan teralokasi anggaran sebesar Rp. 40 Milyar untuk lanjutan pembuatan trestle.
- j. Pengembangan Bandara Sepinggian Balikpapan dikasikan melalui pembangunan gedung terminal penumpang menjadi seluas 110.000 m<sup>2</sup> dengan Garbarata 11 Unit dengan daya tampung 10 juta penumpang tiap Tahunnya meningkat dari kapasitas terminal lama yang hanya 1,7 juta penumpang saja (Tahun 2013 sudah menampung 7,2 juta penumpang). Demikian juga dengan pembangunan gedung parkir dengan kapasitas 1.796 kendaraan dan apron serta infrastruktur lainnya. Sedangkan perpanjangan landasan pacu 750 m dari 2.500 meter menjadi 3.250 m akan diupayakan melalui sumber dana

APBN, sedangkan APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan.

- k. Pembangunan Bandara Samarinda Baru sebagai pengganti Bandara Temindung Samarinda dibangun melalui program Multiyears Contract 2011-2013 sebesar Rp.696 Milyar untuk fasilitas sisi darat dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur progress capaian adalah 100 % terdiri dari pekerjaan infrastruktur dan bangunan teknis, pembangunan gedung terminal penumpang 15.000 m<sup>2</sup> yang mampu menampung 2,5 Juta penumpang/Tahun, pekerjaan bangunan penunjang, dan pengadaan dan pemasangan 2 unit genset kapasitas 2.000 KVA, Fasilitas sisi udara yaitu pematangan lahan seluas 600 x 100 m<sup>2</sup> untuk Apron masih dalam proses pre loading tanah, dengan rencana target selesai 2015 beroperasi.
- l. Pengembangan Bandara Udara Juwata Tarakan dilakukan pembangunan lanjutan apron 2.250 m<sup>2</sup> dengan konstruksi sarang laba-laba, Terminal Penumpang dilengkapi Garbarata 2 unit secara bertahap dan pembangunan landasan pacu baru (paralel runway) tahap I berupa pematangan lahan. Saat ini telah dapat didarati pesawat Boeing 737-900ER dan Airbus 320.
- m. Pembangunan Bandara Maratua Kabupaten Berau dalam rangka mendukung pariwisata dilakukan pekerjaan konstruksi Runway dengan Granular Base Course (GBS) sepanjang 1.040 x 35 meter dan ditargetkan selesai Tahun 2015. Bandara Maratua dibangun dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertahanan dikarenakan lokasinya yang berada di perbatasan perairan dengan Negara Tetangga.
- n. Pembangunan sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan, meliputi; pembangunan dermaga Sungai

Tidung Pala (pembangunan trestle 31 x 6 m dan dermaga 22 x 22 meter) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi sungai dari dan menuju Kabupaten Tana Tidung. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau (Pekerjaan pembangunan pagar, lanjutan renovasi sarana dan prasarana, renovasi mushola dan saluran outlet) untuk meningkatkan layanan transportasi dan penyeberangan antara Balikpapan – Pejalam serta antar pulau.

- o. Dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian melalui program optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun, sampai Tahun 2013 pada daerah irigasi Biatan Kabupaten Berau telah terbangun 1 buah bendungan, Jalan Akses sepanjang 2,7 Km dan jaringan irigasi sepanjang 11,24 Km sehingga mampu mengairi sawah seluas 1.800 Ha dengan jumlah panen sebanyak 3 kali dalam setahun. Pada daerah irigasi Kaliorang Kabupaten Kutai Timur telah terbangun 1 buah bendung regulator dan jaringan irigasi sepanjang 2,5 Km sehingga mampu mengairi sawah seluas ± 1.300 Ha dengan jumlah panen sebanyak 1-2 Kali dalam setahun. Pada daerah irigasi Labanan telah terbangun jaringan irigasi sepanjang 2,21 Km sehingga mampu mengairi sawah seluas 1.050 meter. Selain itu pada daerah irigasi Semurut telah terbangun 1 buah bendungan, dan pada bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terbangun tanggul sepanjang 800 meter dan 1 buah intake.
- p. Untuk Prasarana Penyediaan Air Baku berupa pembangunan Bendungan Sungai Wain sampai Tahun 2013 telah terbangun 40% Tubuh Bendung dan Sumur Dalam sebanyak 3 titik dengan debit 10-15 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan Industri

Kariangau di samping kebutuhan air baku penduduk Kota Balikpapan. Selain itu juga terbangun 1 Unit Free Intake dan reservoir di Sekerat Kab. Kutai Timur dalam rangka memenuhi air baku di Kawasan Industri Maloy.

- q. Dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian melalui Program Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah terbangun, sampai Tahun 2013 pada Daerah Irigasi Biatan Kabupaten Berau telah terbangun 1 Buah Bendungan, Jalan Akses sepanjang 2,7 Km dan Jaringan Irigasi sepanjang 11,24 Km sehingga mampu mengairi sawah seluas 1.800 Ha dengan Jumlah panen sebanyak 3 kali dalam seTahun. Pada Daerah Irigasi Kaliorang Kab. Kutai Timur telah terbangun 1 Buah Bendung regulator dan Jaringan irigasi sepanjang 2,5 Km sehingga mampu mengairi sawah seluas  $\pm$  1.300 Ha dengan Jumlah Panen sebanyak 1-2 Kali dalam seTahun. Pada Daerah irigasi Labanan telah terbangun jaringan irigasi sepanjang 2,21 Km sehingga mampu mengairi sawah seluas 1.050 meter. Selain itu pada Daerah Irigasi Semurut telah terbangun 1 buah Bendung, dan pada Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terbangun Tanggul sepanjang 800 meter dan 1 buah intake.
- r. Untuk Prasarana Penyediaan Air Baku berupa pembangunan Bendungan Sungai Wain sampai Tahun 2013 telah terbangun 40% Tubuh Bendung dan Sumur Dalam sebanyak 4 titik dengan debit 10-15 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan Industri Kariangau di samping kebutuhan air baku penduduk Kota Balikpapan. Selain itu juga terbangun 1 Unit Free Intake dan reservoir di Sekerat Kab. Kutai Timur dalam rangka memenuhi air baku di Kawasan Industri Maloy.

- s. Dalam rangka pengendalian daya rusak air melalui Program Pengendalian banjir Kota Samarinda yang meliputi Sistem Karang asam Kecil, Sistem Karang asam Besar, Sistem Karangmumus, Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam, sampai Tahun 2013 telah terbangun 1 buah Bendali H.M. Ardan, normalisasi dan perkuatan tebing sepanjang 16.221,7 meter sehingga melalui program ini, mampu mereduksi banjir yang akan terjadi pada kawasan banjir di Kota Samarinda.
- t. Dalam rangka mendukung Pengembangan Rice & Food Estate, melalui Program Jaringan tata Air Daerah rawa sampai Tahun 2013 telah terbangun Saluran Pembuang Primer sepanjang 15,42 Km di Daerah Rawa Tanjung Buka SP 5 - 6 Kabupaten Bulungan sehingga mampu mengairi daerah rawa seluas 3.300 ha untuk meningkatkan produktifitas pertanian terutama pangan yaitu beras serta menunjang program transmigrasi.
- u. Penyelesaian Pembangunan Convention Hall Tahap 1 yang dibangun melalui program Multiyears Contract 2011-2013 telah selesai 100% berupa Pekerjaan Struktur Gedung, Arsitektur bagian Eksterior Gedung dan sebagian pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal. Pembangunan Convention Hall ini direncanakan dilanjutkan untuk penyelesaian Landscape, Parkir, Arsitektur dan Mebeulair pada Tahun 2014 – 2015 sehingga dapat dimanfaatkan sebagai gedung pertemuan dan pameran (exhibition) berskala nasional dan internasional.

### 4.3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

- Beberapa kegiatan pembangunan jalan masih terkendala proses pembebasan lahan, seperti kegiatan pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda, pembangunan jalan akses jembatan Pulau Balang, pembangunan jembatan kembar (Mahakam 4) dan pembangunan jalan Batu Besaung – Bandara Samarinda Baru.
- Juga terkait syarat pembebasan lahan, beberapa kegiatan pembangunan jalan memerlukan dokumen AMDAL.
- Untuk membangun bendung/bendungan/waduk masih terkendala dalam izin penetapan lokasi perlu percepatan serta pembebasan lahan masyarakat yang terkena bangunan air maupun jaringan irigasi yang akan dibuat.
- Pada program pengendalian banjir, masalah yang timbul adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan program pengendalian banjir seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas saluran drainase, membuang sampah di sungai, serta dunia usaha yang juga turut menimbulkan masalah dengan mengupas lahan dengan menutup daerah resapan air, sehingga tingkat erosi yang terjadi semakin besar yang berakibat tingkat sedimen yang sangat sangat tinggi, selain pembebasan lahan yang belum tuntas oleh pemerintah setempat, perlu keseriusan Pemerintah Kota.



**b. Solusi**

- Dalam mengatasi masalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, perlu peran aktif untuk mempercepat proses tersebut dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
- Melaksanakan kegiatan pembuatan dokumen AMDAL untuk ruas-ruas jalan yang untuk pelaksanaan kegiatannya memerlukan dokumen tersebut.
- Diperlukan komitmen pemerintah setempat yang kuat dan tegas serta kepedulian yang tinggi, sehingga ijin penetapan lokasi bisa secepatnya dikeluarkan begitu juga dengan pembebasan lahan secepatnya diselesaikan.
- Perlu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang bisa dipakai untuk memaksa masyarakat dan dunia usaha agar bisa mematuhi/menjalankan peraturan yang ditetapkan.
- Diperlukan tenaga-tenaga di pemerintah setempat yang punya komitmen dengan pekerjaannya sehingga mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi terhadap suatu program kegiatan pemerintah.

**Agenda 3 :  
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Pembangunan Sumber Daya Manusia diupayakan melalui pencapaian Prioritas 2; Pengentasan Kemiskinan, Prioritas 3; Pengangguran, dan Prioritas 8; Peningkatan Mutu/Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.

## 1. Prioritas 2 : Pengentasan Kemiskinan

### 1.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 2: Pengentasan Kemiskinan adalah melalui pelaksanaan 13 program dan 26 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226,06 Milyar.

Tabel 4.8 Program Kegiatan Prioritas terkait Pengentasan Kemiskinan

Prioritas 2 : Pengentasan Kemiskinan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		DINAS KESEHATAN
	1.1	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	
	1.2	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	
2	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		DINAS PENDIDIKAN
	2.1	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	
UPTD PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS			
3	Program Pendidikan Menengah		
	3.1	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi dan Siswa Kurang Mampu	BIRO EKONOMI
4	Program Raskin		
	4.1	Fasilitasi penyaluran Raskin	DINAS SOSIAL
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
	5.1	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	
	5.2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	6.1	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN SAMARINDA			
	6.2	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA SAMARINDA			
	6.3	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA SAMARINDA			

	6.4	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	DINAS SOSIAL
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU TANJUNG SELOR			
	6.5	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI SAMARINDA			
	6.6	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	
7	Program Pengembangan Perumahan		DINAS PEKERJAAN UMUM
	7.1	Pembangunan Rumah Korban Bencana	
	7.2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	
8	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UMKM
	8.1	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	
	8.2	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	
9	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
	9.1	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	
10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	10.1	Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan	
	10.2	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)	
11	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		
	11.1	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	
	11.2	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	
12	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna		
	12.1	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	
	12.2	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pedesaan	
13	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		
	13.1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	
	13.2	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	

## 1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 2: Pengentasan Kemiskinan pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 91.54 %.

Dibidang penanggulangan kemiskinan, telah dilakukan upaya-upaya guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, hal ini ditunjukkan oleh data statistik jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur yang terus mengalami penurunan secara signifikan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2008 jumlah penduduk miskin 284.440 orang (9,51%), dan sampai pada Tahun 2013 penduduk miskin menurun menjadi 237.960 orang (6,06%) yang berarti terdapat penurunan persentasi jumlah penduduk miskin selama lima Tahun sebesar 3,45%. Dengan demikian selama lima Tahun ini, terdapat 46.480 orang yang keluar dari kemiskinan.

Beberapa capaian dari upaya yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulan Kemiskinan berbasis keluarga (*cluster* 1) yang ditujukan untuk mengurangi beban hidup mayarakat miskin, antara lain :
  - Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pada Tahun 2013 telah terealisasi 27.598 RTSM, pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tidak layak huni, pada Tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 154 KK sehingga selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 berjumlah sebanyak 440 KK, Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak; Pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar termasuk anak cacat terlantar,

anak berhadapan dengan hukum, anak nakal, anak jalanan, baik kepada 130 Panti Asuhan maupun Non Panti pada Tahun 2013 terealisasi 4232 anak sehingga selama kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan 2013 teralisasi untuk 7945 Anak, dan khusus pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan selama Tahun 2013 telah dibina sebanyak 210 Anak.

- Pada Tahun 2013 melalui Progam Keluarga Harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan PKH Award dari Menteri Sosial RI kategori sharing dana terbesar, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap penanggulangan kemiskinan sangat tinggi.
- Fasilitasi penyaluran bantuan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) sebanyak 147.718 RTSM.
- Dalam upaya peningkatan kesehatan bagi keluarga miskin, melalui APBD Provinsi pada Tahun 2013 dialokasikan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui UPTD Jamkesprov Dinas Kesehatan sebesar Rp. 30,7 Milyar. Dari dana tersebut sebesar 20 Milyar dipergunakan untuk membiayai pengobatan keluarga miskin, dengan realisasi sebesar 17,6 Milyar. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 183.100 orang. Cakupan Jaminan Kesehatan masyarakat miskin telah mencapai 100 %.
- Bantuan beasiswa miskin kepada 23.295 orang pada Tahun 2012 sebesar Rp. 94,4 Milyar dan pada Tahun 2013 meningkat 35.277 orang dengan nilai sebesar Rp. 169 Milyar.

- b. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (cluster 2) yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha, antara lain:
- Pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan melalui fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan); PNPM-Mandiri Perkotaan. Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota, telah mampu mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat perdesaan sebanyak 71.688 RTM (31%).
  - Fasilitasi PNPM-Mandiri Perdesaan dilaksanakan di 10 Kabupaten telah mampu mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup masyarakat perdesaan dengan jumlah pemanfaat sebanyak 123.499 Rumah Tangga Miskin terdiri dari 277.315 orang, dari data tersebut Serapan Tenaga Kerja dengan jumlah total 14.217 Orang dan sebanyak 11.117 Orang dari Rumah Tangga Miskin. PNPM Mandiri Perdesaan telah berhasil membantu masyarakat miskin perdesaan dalam penyediaan fasilitas sosial ekonomi dan utilitas. Melalui Pelatihan Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Masyarakat), dan penyaluran bantuan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) untuk Peningkatan usaha ekonomi produktif, PNPM Mandiri Perdesaan juga telah mampu memberikan peluang berusaha bagi 142.767 orang miskin perdesaan, selain itu juga telah mampu menumbuhkan sebanyak 5.401 kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Beberapa

penghargaan diraih Kalimantan Timur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan antara lain :

- Juara III Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional diraih oleh Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
  - Juara harapan I pelaksana terbaik Gotong Royong Masyarakat, diraih oleh Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
  - Juara harapan I pelaksana terbaik Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), untuk kategori Sekolah diraih oleh SD 005 Malinau Barat, Kab.Malinau.
  - Juara harapan 3 pelaksana terbaik PMT-AS untuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diraih oleh Kabupaten Malinau.
  - Pemberdayaan sosial telah berhasil meningkatkan kemandirian wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 170 KK, wanita bermasalah sosial/wanita korban tindak kekerasan sebanyak 130 orang, masyarakat terasing/ komunitas adat terpencil sebanyak 114 KK.
- c. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan UMKM (Cluster 3) yang ditujukan untuk meningkatkan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah, antara lain:
- Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), terealisasi sebanyak 260 KUBE (2.200 KK).
  - Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Terapan untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah usaha mikro kecil, Menengah (UMKM),

telah berhasil mendorong pembentukan 81 Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Tingkat/kerajinan Kecamatan dengan Produk Peralatan TTG sebanyak 48 Unit dan Produk Olahan/kerajinan sebanyak 28 macam. Penghargaan Tingkat Nasional yang diraih Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui pendayagunaan TTG adalah Juara II Lomba Posyantek Tingkat Nasional diraih Posyantek Harapan Kita, Kecamatan Tana Paser, Kabupaten Paser.

- Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha sebanyak 3.000 orang.
- d. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pro Rakyat Lainnya, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin.
- Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu dan pengembangan kawasan pemukiman sebanyak 1.006 Unit.
  - Rekonstruksi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Abrasi, Masyarakat Toko Lima, Jalan Kapitan, Desa Muara Badak Ilir RT.05 dan 07 Muara Badak, Kab.Kukar).

### **1.3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- Belum terintegrasinya Program kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas wilayah.
- Penanganan masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan melalui pendampingan pengembangan



kewirausahaan belum tuntas sampai meningkatnya kemandirian berwirausaha masyarakat miskin.

- Data kemiskinan yang tidak up to date dikarenakan faktor migrasi penduduk.
- Distribusi kartu jamkesprov masih belum optimal, masih ada kartu yang tidak bisa didistribusikan karena antara lain peserta meninggal dunia atau pindah alamat serta adanya peserta pendatang baru dari luar provinsi.
- Kriteria 'miskin' yang ditetapkan BPS sering tidak tepat dengan kondisi masyarakat dan daerah. Data kemiskinan (PPLS) 2011 belum akurat untuk dijadikan basis data terpadu.
- Penanggulangan Kemiskinan belum melibatkan dunia usaha atau masyarakat mampu/CSR.

**b. Solusi**

- Peningkatan sistem dan mekanisme pendistribusian kartu peserta Jamkesprov melalui proses verifikasi yang akurat.
- Updating data PPLS 2011 dengan menyesuaikan kondisi kriteria miskin di daerah.
- Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan dan dengan melibatkan peran dunia usaha/CSR dan masyarakat.

## **2. Prioritas 3 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

### **2.1. Program dan Kegiatan**

Upaya pencapaian prioritas 3: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah melalui pelaksanaan 7 program dan 10 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70,71 Milyar.

Tabel 4.9 Program Kegiatan Prioritas  
terkait Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Prioritas 3 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja			
No	Program / Kegiatan		SKPD
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
	2.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	
	2.2	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	
	2.3	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	
	2.4	Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya	
3	Program Pendidikan Menengah		DINAS PENDIDIKAN
	3.1	Pembangunan gedung sekolah	
4	Program Pendidikan Non Formal		
	4.1	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	
UPTD PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR			
	4.2	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	
5	Program Pendidikan Non Formal		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	5.1	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		DINAS KESEHATAN
	6.1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		DINAS KESEHATAN
	7.1	Penyediaan Calon Tenaga Kerja Keperawatan	

## 2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 3: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 77,18 %.

Untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran, pemerintah provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan peluang

kesempatan kerja disektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan) hal ini terlihat adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja disektor Pertanian dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 sebanyak 26,61% atau sebanyak 432.219 Tenaga Kerja.

Beberapa capaian hasil pembangunan prioritas 3 di Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- Melalui Bursa Kerja On Line (BKOL) dan Market Job Fair (JMF), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi kepentingan antara Pencari Kerja dengan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja dan sebagian besar telah ditempatkan, sehingga pada Tahun 2013 jumlah orang yang bekerja sebanyak 1.721.816 orang. Angka ini memberikan kontribusi menurunkan angka pengangguran menjadi 8,87% dari 8,90% pada Tahun 2012.
- Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 telah mencapai sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp. 1.752.073,- atau 100 % KHL.
- Selain dari hal tersebut diatas, sejak Tahun 2009 s.d 2013 telah dilakukan upaya perlindungan terhadap sebanyak 1.711.697 tenaga kerja melalui Pembinaan Hubungan Industrial serta Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Melalui kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial telah dibentuk 2 (dua) Lembaga Kerjasama Tripartit dan 2 (dua) Dewan Pengupahan. Dengan kondusifnya hubungan industrial maka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja frekuensinya semakin Tahun semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan Zore Accident dimana Tahun 2009 s.d 2013 Provinsi Kalimantan timur berada pada posisi I, II pada tingkat Nasional.

- Terjadinya peningkatan perempuan dalam bidang eksekutif (perempuan dalam jabatan pemerintahan) semula pada akhir Tahun 2012 sudah mencapai 30,16%, dan sampai Tahun 2013 persentasenya mencapai 37,78%. Penghargaan Nasional daam keberhasilan sebagai pelaksana strategi pengarusutamaan gender dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan berupa piala dan piagam APE (Anugerah Parahita Ekapraya) tingkat Madya yang diserahkan langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur oleh Presiden RI.
- Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan berwirausaha melalui program pengembangan pendidikan non formal, kecakapan hidup dan kewirausahaan.
- Meningkatnya rasio tenaga kesehatan melalui penyediaan tenaga kerja keperawatan.

## 2.3. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

- Tingginya Angka pertumbuhan penduduk, terutama migrasi memberikan kontribusi yang besar pada meningkatnya angka pengangguran.
- Kompetensi tenaga kerja yang tersedia beum memenuhi dengan kebutuhan pasar kerja.

### b. Solusi

- Perbaiki manajemen kependudukan
- Meningkatkan kegiatan padat karya.
- Identifikasi dan penyempurnaan kurikulum pendidikan formal di tingkat menengah dan perguruan tinggi.
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan

- Meningkatkan mutu LPK
- Meningkatkan jumlah dan kualitas instruktur

### 3. Prioritas 8 : Peningkatan Mutu/Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan

#### 3.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 8: Peningkatan Mutu/Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan adalah melalui pelaksanaan 16 program dan 54 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 644,82 Milyar.

Program “KALIMANTAN TIMUR CEMERLANG” (Cerdas, Merata, Prestasi Gemilang) dan Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan upaya pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan 20%, alokasi dana fungsi pendidikan pada Tahun 2012 mengalami peningkatan dari Rp 2,096 Trilyun menjadi sebesar Rp 2,309 Trilyun pada Tahun 2013.

Tabel 4.10 Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan Mutu/Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan

<b>Prioritas 8 : Peningkatan Mutu/Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>SKPD</b>
<b>1</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>
1.1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	
1.2	Rehab Ruang Kelas	
1.3	Pembangunan gedung sekolah terpadu	
<b>2</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	
2.1	Pembangunan Gedung Sekolah	
<b>3</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	
3.1	Pembangunan Education Centre	
3.2	Pembangunan gedung sekolah	
3.3	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	
3.4	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	
3.5	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	
3.6	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	
3.7	Workshop Guru BK	
3.8	Pembinaan Porseni SMP	
3.9	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	

	3.10	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	DINAS PENDIDIKAN
	3.11	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	
UPTD PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS			
	3.12	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	
	3.13	Pembinaan Olimpiade Sains SMP/SMA	
UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN			
	3.14	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi RSBI	
4	Program Pendidikan Non Formal		
	4.1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	
	4.2	Pengembangan pendidikan keaksaraan	
	4.3	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	
UPTD PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR			
	4.4	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	
	4.5	Pemberian operasional pendidikan non formal	
	4.6	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	
	4.7	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	5.1	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	
	5.2	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
	5.3	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	
	5.4	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	
UPTD PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR			
	5.5	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
	5.6	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	
UPTD PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS			
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
	6.1	Pengembangan Sekolah Unggulan RSBI/SBI	

UPTD SMK PELAYARAN			DINAS PERHUBUNGAN
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	7.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pembelajaran Manajemen dan Teknis/Administrasi)	
8	Program Pendidikan Menengah		
	8.1	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi RSBI	
9	Program Peningkatan SDM Perhubungan		
	9.1	Sertifikasi Pendidikan Kepelautan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga (uptd skoi)		
	10.1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri	
	10.2	Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Olah Raga Terpadu Negeri	
11	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		
	11.1	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	
	11.2	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	
	11.3	Penyelenggaraan Olah Raga Multi Event	
	11.4	Penyelenggaraan Event Olah Raga Tradisional	
	11.5	Pembinaan Klub Olahraga Mahasiswa di Perguruan Tinggi	
12	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		
	RS AWS		
	12.1	Pembangunan rumah sakit	
	12.2	Pengembangan ruang operasi	
	12.3	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/kedokteran umum	
	RS KANUJOSO		
	12.4	Pembangunan rumah sakit	
	12.5	Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap (IRNA)	
	RSJD AHM		
	12.6	Pembangunan rumah sakit	
	RS TARAKAN		
	12.7	Pembangunan rumah sakit	DINAS KESEHATAN
13	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		
	13.1	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	
14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		

	14.1	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	DINAS KESEHATAN
	14.2	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
	15.1	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		
	16.1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	

### 3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 8: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 80,92 %.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam pencapaian peningkatan mutu pendidikan antara lain :

- Pengembangan Sekolah Unggulan Tahun 2012 sebanyak 43 Sekolah Unggulan, hingga Tahun 2013 menjadi 44 Sekolah.
- Pemberian tambahan penghasilan Guru (Insentif) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Guru di semua jenjang pendidikan baik Negeri maupun Swasta dengan jumlah guru 65.074.
- Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), diarahkan untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di Sekolah Lanjutan Atas baik Negeri maupun Swasta untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK sebanyak 150.367 siswa.
- Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Guru ke jenjang S1/D4 yang sampai Tahun 2013 mencapai sebesar 51,99%.



- Bantuan kepada para pendidik/tutor dalam bentuk insentif dengan jumlah penerima 33.454 orang.

Beberapa capaian hasil pembangunan bidang pendidikan diantaranya :

- Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami fluktuatif, dimana untuk jenjang pendidikan SD/MI dari 113,67% di Tahun 2012 menjadi 113,75% pada Tahun 2013. Sementara untuk APK SLTP/MTs dari 97,75% menjadi 97,77% dan APK SMA/MA/SMK/MAK dari 86,26% di Tahun 2012 menjadi 87,51% Tahun 2013.
- Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan, dimana untuk usia 7-12 Tahun 94,37% di Tahun 2012 dan Tahun 2013 menjadi 97,68%. Pada usia 13-15 Tahun 74,37% meningkat menjadi 88,12%. Sedangkan pada anak usia 16-18 Tahun, angka partisipasi murni 59,75% di Tahun 2012 dan Tahun 2013 naik menjadi 75,62%.
- Angka melek huruf penduduk usia 10 Tahun keatas di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2012 mencapai 97,26% dan pada Tahun 2013 menjadi 97,50% Tahun.
- Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan 3 (tiga) penghargaan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yaitu untuk kategori; 1) Gubernur sebagai penggagas beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang, 2) Pemprov Kalimantan Timur yang menganggarkan beasiswa terbesar se-Indonesia melalui sumber dana APBD, 3) Tim Pengelola Beasiswa terbesar di Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memperoleh prestasi tingkat nasional yaitu peringkat 1 lomba *Athletic Turbo Throwing*, medali emas dalam lomba membaca al

Quran, medali emas dalam cabang olahraga atletik, serta memperoleh peringkat I Terbaik pemilihan Pengelola PAUD.

- Pada Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Timur telah memperoleh prestasi tingkat Nasional pada cabang olahraga *Athletic Kid's Slalom* memperoleh juara I, medali emas pada cabor Renang, dan medali emas pada cabor pencak silat.
- Pada Tahun 2012 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur telah memperoleh prestasi tingkat nasional pada kegiatan pemilihan Pengelola PAUD memperoleh peringkat I Terbaik.
- Penghargaan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak adalah terpilihnya Kalimantan Timur sebagai Pengembang Kota Layak Anak terbaik tingkat PRATAMA Tahun 2013 yaitu Berau, Paser dan Kukar, sedangkan pada Tahun sebelumnya (Tahun 2012) hanya kota Balikpapan.
- Untuk mencetak atlet muda berprestasi melalui pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) yang diresmikan pembangunannya pada 11 Juni 2013. Fasilitas daya tampung hingga 600 siswa. Prestasi Siswa SKOI telah meraih 683 medali tingkat Regional, Nasional dan Internasional, dan dalam PON XVII Riau menyumbang 11,4% perolehan medali bagi Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan bidang kesehatan adalah merupakan wujud upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan.

Beberapa capaian hasil pembangunan bidang kesehatan diantaranya :

- Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi mengalami peningkatan yaitu sebanyak 22 buah, jika dibandingkan dengan Tahun 2009 yang baru berjumlah 4 buah.
- Pelayanan Kesehatan Mata telah memberikan pelayanan operasi buta katarak sebanyak 1573 orang dari target 1550 orang (101%).
- Jumlah tenaga kesehatan juga bertambah yang tersebar diseluruh kawasan daerah Kalimantan Timur. Ketersediaan tenaga Kesehatan di wilayah Kalimantan Timur hingga Tahun 2013, yang meliputi Dokter Umum sebanyak 1.121 orang, dokter spesialis sebanyak 420 orang (11/100 ribu penduduk), dokter gigi sebanyak 421 orang (11/100 ribu penduduk). Untuk tenaga Bidan juga mengalami peningkatan jumlahnya sebanyak 2.596 orang (70/100 ribu penduduk), untuk tenaga perawat sebanyak 5.633 orang (153/100 ribu penduduk). Disamping itu para tenaga ahli kesehatan juga semakin berkembang seiring dengan kebutuhan tenaga kesehatan.
- Angka kesakitan malaria di Kalimantan Timur, berdasarkan indikator *Annual Paracite Incidence* (API) yang dilaporkan pada akhir Tahun 2012 1,69% menjadi 1,2% pada Tahun 2013.
- Prevalensi HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil diturunkan hingga mencapai sebesar 0,058 % dari target <1 %. Penurunan ini karena semakin baiknya koordinasi antar komponen yang terkait langsung dengan pengendalian penularan HIV/AIDS diantaranya Komisi

Penanggulangan AIDS Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan lembaga swadaya masyarakat maupun pemerhati terhadap penyakit HIV/AIDS.

- Pengobatan penderita TB BTA+ baru mencapai 82,8% dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar >85, hal ini dikarenakan keengganan pasien untuk memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan.
- Angka penemuan kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, kanker, diabetes dan lain sebagainya belum tercapai di Tahun 2013 karena hanya sebesar 50 % dari target 100%. Penyakit tidak menular yang dapat diamati melalui surveilans adalah kegiatan puskesmas sentinel yang melaksanakan program PTM yaitu hipertensi dan *Diabetes Mellitus*.
- Dalam pelaksanaan program bidang kesehatan, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur telah menerima penghargaan di bidang kesehatan yaitu penghargaan Kota Sehat Tingkat Nasional.

### **3.3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- Rendahnya capaian guru yang telah memenuhi Kualifikasi S1/D4 karena guru-guru yang berada di daerah pedalaman dan perbatasan tidak mau mengikuti kualifikasi S1/D4 dan tidak mau meninggalkan tempat mengajar karena tidak akan menerima insentif dari Pemerintah Daerah.
- Masih kurangnya fasilitas pelayanan rumah sakit dalam memenuhi syarat rumah sakit kelas A, karena sempitnya areal.
- Belum adanya fasilitas komputerisasi dan billing system antar ruang pelayanan yang membuat lamanya proses

pelayanan dan pengolahan data administrasi di pelayanan Rumah Sakit Daerah. Sistem rujukan yang masih belum tertata dengan baik.

- Jumlah dan sebaran sarana kesehatan dan SDM Kesehatan untuk pelayanan KIA belum memadai dan merata.
- Keterbatasan tenaga surveillance dan kurangnya peran serta masyarakat dalam penemuan kasus penyakit menular.
- Pelayanan Dokter spesialis masih rendah karena mobilitas tenaga dokter yang sebagian besar dari luar Kalimantan Timur sangat tinggi.

**b. Solusi**

- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (UPTD PKLK) untuk mengakomodir keberadaan Sekolah eks RSBI dan SBI menjadi Sekolah Unggulan yang ada di Kalimantan Timur.
- Sosialisasi yang intensif dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota agar memberikan pemahaman terhadap guru yang berada di pedalaman dan perbatasan agar mau mengikuti kualifikasi guru S1/D4.
- Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.
- Kerjasama dengan publik private area seperti LAPAS dan RUTAN dalam penanggulangan TB.
- Memberikan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran, bidan dan keperawatan dengan perjanjian setelah lulus untuk mau mengabdikan di Kalimantan Timur, dan memberikan insentif baik financial maupun non financial untuk meningkatkan minat para lulusan kedokteran

mengabdikan di Kalimantan Timur.

- Meningkatkan infrastruktur sarana prasarana pelayanan kesehatan.

## B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

### Agenda 2 :

### Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat

#### 1. Prioritas 1 : Ketahanan dan Kemandirian Pangan

##### 1.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 1; Ketahanan dan Kemandirian Pangan adalah melalui pelaksanaan 16 program dan 20 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66,62 Milyar.

**Tabel 4.12 Program Kegiatan Prioritas terkait Ketahanan dan Kemandirian Pangan**

PRIORITAS 1 : KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			
No		Program/Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	1.1	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan		
	2.1	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	
	2.2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan	
3	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		UPTD Balai Benih Induk Holtikultura
	3.1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	
4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija
	4.1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	
5	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura
	5.1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	
6	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		Dinas

	6.1	Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RDKK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutlah	<b>Perkebunan</b>
<b>7</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan</b>		<b>Dinas Perkebunan</b>
	7.1	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>		
	8.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan	
<b>9</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>		<b>Dinas Peternakan</b>
	9.1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>		
	10.1	Pengembangan Agribisnis Peternakan	
	10.2	Pengembangan Perbibitan dan Budidaya	
	10.3	Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	
<b>11</b>	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>		<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>
	11.1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
<b>12</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</b>		
	12.1	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	
<b>13</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>		<b>BADAN KETAHANAN PANGAN &amp; PENYULUHAN (BKPP)</b>
	13.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (UPTB BALAI PELATIHAN PERTANIAN)	
<b>14</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>		
	14.1	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	
<b>15</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>		
	15.2	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	
<b>16</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>		
	16.1	Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan	
	16.2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Penvuluh	

## 1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 1; Ketahanan dan Kemandirian Pangan pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 93,63 %.

Beberapa capaian hasil pembangunan Prioritas 1 Ketahanan dan Kemandirian Pangan, antara lain :

- Tingkat ketersediaan energi mengalami peningkatan 113,32 % dimana pada Tahun 2013 mencapai sebesar 2.493 kilokalori per kapita per hari kilokalori per kapita. Tingkat ketersediaan protein perkapita mengalami peningkatan 136,04 % dimana pada Tahun 2013 mencapai sebesar 78,00 gram per kapita per hari. Sedangkan tingkat ketersediaan lemak perkapita mengalami peningkatan 1,43 % dimana pada Tahun 2013 mencapai sebesar 66,8 gram per kapita per hari. Berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi yang ditetapkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, angka ketersediaan energi dan protein sudah melebihi angka yang menjadi standar.
- Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras yang ditargetkan 1,5% per kapita perTahun yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI Tahun 2010, maka telah dikeluarkan instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penganekaragaman Pangan di Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Timur. Gerakan ini mulai menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari aspek konsumsi dari 79,1 pada Tahun 2012 menjadi 79,9 pada Tahun 2013.
- Dalam upaya mendukung pelaksanaan program strategis pembangunan pertanian dalam arti luas, diperlukan SDM penyuluh yang cukup, handal dan berkualitas agar petani menjadi produktif, mandiri, dan berkemampuan manajerial dalam mengembangkan usaha tani. Jumlah penyuluh PNS sampai Tahun 2013 sebanyak 849 orang dan penyuluh THL



sebanyak 305 orang. Jumlah Penyuluh yang telah melakukan sertifikasi profesi penyuluh sampai dengan Tahun 2013 adalah sebanyak 25 Orang untuk Penyuluh Pertanian Terampil di provinsi dan 14 Kab/Kota, 3 Orang untuk Penyuluh Pertanian Ahli di Provinsi dan 14 Kab/Kota, 6 Orang untuk penyuluh pertanian ahli di BPTP, sehingga total penyuluh yang bersertifikat profesi Penyuluh 34 Orang. Untuk mengapresiasi para penyuluh dan kelompok tani tersebut, Pemerintah memberikan Perhargaan kepada Penyuluh Berprestasi setiap Tahunnya dan dilaksanakan pada acara HUT Kemerdekaan RI.

- Luas areal perkebunan secara keseluruhan yang meliputi tanaman kelapa sawit , karet, kakao, kelapa, lada dan aneka tanaman mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata-rata sebesar 28,59 % yaitu dari 995.618 Ha pada Tahun 2012 menjadi 1.280.293 Ha pada Tahun 2013. Penambahan areal yang paling luas adalah tanaman kelapa sawit, dimana tanaman ini mengalami peningkatan sebesar 15,11 % yaitu dari 961.802 Ha pada Tahun 2012 menjadi 1.107.153 Ha pada Tahun 2013. Produksi perkebunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan 58,11 % yaitu dari 4,56 juta ton pada Tahun 2012 menjadi 7,21 Juta ton pada Tahun 2013. Produksi ini telah melampaui target dalam RPJMD yaitu sebesar 4,5 juta ton pada Tahun 2013.
- Pengembangan perkebunan kelapa sawit terintegrasi dengan pembangunan pabrik pengolahan, dan seiring dengan semakin meningkatnya produksi TBS, maka dalam rangka pengolahan hasil tersebut sampai dengan Tahun 2013 telah dibangun 60 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas keseluruhan 2.870 Ton TBS/Jam. Dari total 60 pabrik kelapa sawit, 49 pabrik kelapa sawit telah operasional dengan kapasitas keseluruhan 2.360

Ton TBS/Jam sedangkan 11 pabrik kelapa sawit dalam tahap pembangunan dengan rencana kapasitas 510 Ton TBS/Jam.

- Produksi Padi dari Tahun 2012 sampai Tahun 2013 meningkat sebesar 0,34 % yaitu 561.959 Ton pada Tahun 2012 menjadi 563.850 Ton Tahun 2013. Realisasi luas tanam padi Tahun 2013 seluas 136.144 Ha melebihi dari target seluas 127.569 Ha. Realisasi luas panen padi Tahun 2013 sebesar 138.768 Ha kurang dari target seluas 140.059 Ha. Produktivitas padi Tahun 2013 sebesar 40,63 Kwt/Ha melebihi target sebesar 39,35 Kwt/Ha. Walaupun produksi padi meningkat tetapi tingkat ketersediaan beras pada Tahun 2013 hanya mencapai 78,70% dari kebutuhan beras penduduk Kalimantan Timur, sehingga Kalimantan Timur masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan beras dalam daerah.
- Penyediaan sarana dan prasarana pertanian meliputi; Pembangunan Jaringan Irigasi (Jaringan Irigasi Desa/Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) seluas 28.150 ha, tersebar di 10 Kabupaten (Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Malinau dan Nunukan dan Tana Tidung) ; Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 100,78 km, tersebar di 12 Kabupaten/Kota (Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Malinau dan Nunukan dan Tana Tidung, Balikpapan dan Samarinda); Pembangunan Pintu Air sebanyak 212 unit di 8 Kabupaten/Kota yaitu Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kutim, Berau, Bulungan, Nunukan dan Samarinda); Bantuan Pestisida untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, sebanyak 31.051 paket di 14 Kabupaten/Kota; realisasi pupuk bersubsidi sebanyak 49.750 ton di 14 Kabupaten/Kota; bantuan alat mesin pertanian pada Tahun 2013 terdiri dari Hand Traktor 140 unit, Power

Thresher 28 unit, Cultivator 46 unit dan Penggilingan Padi 2 unit di 14 Kabupaten/Kota..

- Perkembangan produksi tanaman hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran menurun 25,18%, tanaman obat meningkat 213%. Sementara untuk tanaman buah-buahan antara lain ; Durian mencapai produksi 6.097 ton; Jeruk mencapai produksi 36.592 ton ; Pisang mencapai produksi 363.425 ton ; Pepaya mencapai produksi 12.842 ton. Dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura, telah dilakukan upaya-upaya; pengembangan kawasan durian/lai seluas 20 ha di 7 Kabupaten yaitu Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Berau, Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung; Pengembangan kawasan Jeruk seluas 1.511 ha di 8 Kabupaten, yaitu Paser, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan dan Nunukan; Pengembangan kawasan pepaya mini seluas 123 ha di 2 Kota, yaitu Balikpapan dan Samarinda; Pengembangan kawasan pisang seluas 1.229 ha di 4 Kabupaten yaitu Paser, Kukar, Kutim dan Nunukan. Perkembangan produksi beberapa komoditi palawija yang terdiri dari jagung mencapai 5.825 ton, kedele mencapai 1.486 ton, kacang tanah mencapai 1.665 ton, kacang hijau mencapai 440 ton, ubi kayu mencapai 88.101 ton dan ubi jalar 15.841 ton.
- Dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan, telah dilakukan pencetakan sawah baru seluas 13.827 Hektar hingga Tahun 2013, tersebar di 10 Kabupaten (Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Malinau dan Nunukan dan Tana Tidung). Selain kegiatan cetak sawah, dilaksanakan pula kegiatan Optimasi Lahan seluas 8.040 ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Disamping itu dilakukan pengembangan Food/Rice Estate seluas 279.476

ha meliputi 50.000 Ha di Delta Kayan Bulungan, 4.982 ha di Kabupaten Paser, 1.400 ha di Penajam Paser Utara, 23.845 ha di Kutai Kartanegara, 62.630 ha di Kutai Timur, 71.000 ha di Kutai Barat, 13.901 ha di Berau, 2.745 ha di Malinau, 46.700 ha di Nunukan, 2.873 ha di Tana Tidung. Realisasi pengembangan Food Estate di Delta Kayan di Kabupaten Bulungan adalah panen perdana tanaman pangan dengan hasil ubinan 5,2 Gabah Kering Panen/Ha, dan pembukaan lahan baru seluas 300 ha.

- Produksi peternakan mengalami peningkatan sebesar 14,33% dari 108.648 ekor di Tahun 2012 menjadi 116.797 ekor di Tahun 2013. Perkembangan Produksi Hasil Peternakan antara lain; peningkatan populasi sapi sebesar 5,6% dari 108.648 ekor pada Tahun 2012 menjadi 114.735 ekor pada Tahun 2013; peningkatan populasi ternak itik sebesar 1,66 % dari 218.479 ekor pada Tahun 2012 menjadi 222.103 ekor pada Tahun 2013. Walaupun produksi peternakan meningkat tetapi tingkat ketersediaan produk peternakan terutama daging sapi, susu dan telur ayam ras pada Tahun 2013 sebesar 58,45% dari target 92%, karena produksi yang masih belum mencukupi kebutuhan penduduk Kalimantan Timur.
- Produksi perikanan Kalimantan Timur yang bersumber dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya meningkat sebesar 4,39 %, dimana produksi 438.744,2 ton pada Tahun 2012 menjadi 458.024,8 ton pada Tahun 2013. Produksi terbesar perikanan Kalimantan Timur adalah perikanan darat sebesar 350.876 ton, dengan luas usaha perikanan dari kegiatan budidaya tambak mencapai 231.346 Ha di Tahun 2013 atau meningkat 2,91%. Dalam rangka revitalisasi perikanan tangkap dikembangkan kapasitas tangkap dari 5 Gross Ton (GT) menjadi 30 GT secara bertahap. Sampai dengan Tahun 2013

telah tersedia 24 unit kapal 30 GT dengan alat tangkap Pursesaine. Produksi perikanan didukung oleh armada perikanan tangkap laut sebanyak 28.362 unit dan perairan umum sebanyak 26.158 unit hingga Tahun 2013.

### **1.3 Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- 1) Semakin menurunnya produksi pertanian pangan yang disebabkan antara lain :
  - Alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan karet dan sawit menjadi bagian pengurangan penanaman padi ladang.
  - Keterlambatan bantuan benih menyebabkan terjadinya pergeseran waktu tanam, serta berkembangnya jumlah masyarakat yang berladang dan terjadinya puso akibat banjir maupun kemarau.
  - Serangan beberapa OPT utama seperti tikus dan penggerek batang serta adanya banjir dan kekeringan.
  - Ketersediaan penyuluh baru mencapai 76% dari kebutuhan.
  - Alih profesi dari petani menjadi pekebun dan buruh/pekerja tambang dan berkurangnya rumah tangga petani.
  - Dampak Anomali Iklim/Cuaca menyebabkan terjadinya kemarau / banjir yang ekstrim yang mengakibatkan puso.
  - Kondisi infrastruktur pertanian dan infrastruktur pendukung masih terbatas.
  - Skala usahatani yang dikembangkan pada umumnya relatif kecil dan terpencar - pencar yang disebabkan oleh luas kepemilikan yang sangat

terbatas, sehingga secara ekonomi kurang menguntungkan dalam usaha tani berbasis agribisnis yang menuntut ketersediaan produksi dalam volume dan kualitas yang memadai dan kontinyu.

- Masih rendahnya daya saing hasil produksi pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan dalam hal kualitas dan harga dibanding produk luar. Hal ini disebabkan sistem usahatani belum dikelola secara profesional. Kemajuan teknologi dan informasi pertanian belum banyak dimanfaatkan petani, pada umumnya masih mengembangkan pola-pola pemasaran tradisional.
  - Kerjasama / kemitraan belum berkembang baik sehingga petani masih kesulitan memasarkan produknya.
- 2) Masih besarnya impor komoditi pangan dari luar daerah karena Rasio ketersediaan pangan bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk masih berkisar antara 70 – 80%.
  - 3) Mutu dan Keamanan Pangan Segar yang beredar masih belum memenuhi standar mutu (Prima 3), dimana masih banyak ditemukan cemaran pestisida, parasit dan bahan tambahan kimia lainnya, serta tidak dalam kondisi higienis.
  - 4) Ketersediaan infrastruktur (jalan usaha tani, akses jalan pedesaan) dan pemanfaatan sarana pertanian (benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian) masih terbatas.
  - 5) Produk peternakan lokal belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat disebabkan :
    - produktifitas yang rendah oleh tingkat kelahiran masih rendah yaitu sekitar 19%.

- Adanya kecenderungan memotong sapi pada berat antara 250-300 kg yang sebenarnya masih bisa digemukkan hingga berat mencapai 400-600 kg.
  - IB belum bisa berjalan dengan baik akibat dari belum maksimal peran SPIB, jauh dari jangkauan petugas, kemampuan petugas sebagian masih rendah serta kesadaran petani juga masih rendah.
- Ñ Terbatasnya sumber bibit ternak.
- Ñ Tingkat kesehatan hewan/ternak masih rendah dan rawan terhadap penyakit hewan seperti kasus zoonosis penyakit Avian Influenza (AI) dan Anthrax.
- 6) Masih rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan yang disebabkan antara lain;
- keterbatasan permodalan petani dalam menyediakan sarana produksi (pupuk, obat-obatan) untuk pengendalian OPT dan masih rendahnya SDM petani.
  - Masih rendahnya realisasi pengembangan kebun plasma oleh Perusahaan Perkebunan Besar (PBS) karena proses administrasi pembangunan kebun yang cukup lama.
  - Tumpang Tindih Peruntukan Lahan karena belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang berakibat terjadinya konflik sosial, okupasi dan penyerobotan lahan.
  - Adanya isue negatif yang dikembangkan oleh negara-negara penghasil minyak nabati non sawit (Amerika dan Eropa) tentang komoditi kelapa sawit tidak ramah lingkungan dari negara-negara penghasil minyak nabati, yang berakibat terhambatnya ekspor CPO.

- Terbatasnya infrastruktur, prasarana dan sarana penunjang pembangunan perkebunan serta lemahnya kelembagaan petani.

7) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan karena :

- Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan tangkap Umumnya armada perikanan di Kalimantan Timur masih dibawah 5 GT yang mana daya jelajah untuk wilayah penangkapan hanya berkisar pada 13 mil pantai, sehingga hasil tangkapan menjadi kurang maksimal.
- Beberapa Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dirasakan kurang optimal, bahkan banyak yang belum dioperasikan di beberapa Kabupaten/Kota, sehingga menjadi kendala para nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapan mereka.
- Penurunan tingkat tenaga kerja sektor perikanan disebabkan mahalnya bahan bakar solar untuk menangkap ikan dan mahalnya biaya pupuk serta pakan ikan untuk budidaya perikanan.
- Masih maraknya penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti : Bom, Setrum dan Trawl.

#### **b. Solusi**

- Diversifikasi pangan dan peningkatan produksi dan produktivitas semua subsektor pertanian.
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
- Pemenuhan kebutuhan penyuluh dari swasta dan swadaya.



- Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan swasta dan pihak-pihak tertentu dalam peningkatan kualitas sumberdaya petani/ peternak/penambak/nelayan/pekebun dan penyuluh terutama dalam pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan kualitas kelompok tani/Gapoktan, pelibatan asosiasi/KTNA, UPJA, kios saprodi, pelayanan penyuluhan.
- Penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang melarang terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke peruntukan lainnya, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan rakyat telah dan akan dilakukan melalui ;
  - Pemberian bantuan benih unggul, pengendalian OPT, peningkatan SDM petani.
  - Melakukan pembinaan dan penerapan sanksi bagi PBS yang kurang responsif terhadap penyelesaian pengembangan kebun plasma.
  - Percepatan penyelesaian RTWR oleh Pemerintah sebagai upaya untuk memberikan kepastian usaha dan Perijinan baik bagi dunia usaha maupun usaha perkebunan rakyat.
- Peningkatan infrastruktur pendukung berupa pembangunan jalan-jalan produksi, peningkatan kualitas jalan, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan untuk mengangkut produksi hasil pertanian.

- Pengembangan kapasitas dan kesiapan penangkar-penangkar bibit/benih lokal yang dekat dengan lokasi pengembangan sehingga didalam penyiapan bibit di lapangan disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan bibit pada saat diperlukan.
- Perluasan areal tanam melalui kegiatan Pengembangan Rice/Food Estate, cetak sawah, optimalisasi lahan, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES)/TAM, jalan produksi, pemanfaatan pompa/sumur dan embung serta upaya konservasi pada lahan-lahan marjinal.
- Pengamanan produksi melalui kegiatan antisipasi dampak fenomena iklim, pengendalian OPT, bantuan pestisida dan penanganan pasca panen.

## 2. Prioritas 4 : Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/ Kewirausahaan/ Pengembangan Sektor Riil / UMKM

### 2.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 4; Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/ Kewirausahaan/ Pengembangan Sektor Riil / UMKM adalah melalui pelaksanaan 5 program dan 6 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,77 Milyar.

**Tabel 4.13 Program Kegiatan Prioritas terkait Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/ Kewirausahaan/ Pengembangan Sektor Riil / UMKM**

PRIORITAS 4 : Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/ Kewirausahaan/ Pengembangan Sektor Riil / UMKM		
No	Program/Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
1.1	Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	

	1.2	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	
2	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>		<b>Dinas Perkebunan</b>
	2.1	Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	
3	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>		<b>Dinas Pertanian Tanaman Pangan</b>
	3.1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Pertanian	
4	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>		<b>Dinas Peternakan</b>
	4.1	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	
5	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>		
	5.1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna (IB dan ET)	

## 2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 4; Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/ Kewirausahaan/ Pengembangan Sektor Riil / UMKM pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 95,86 %.

Beberapa capaian hasil pembangunan Prioritas 4 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/Kewirausahaan/Pengembangan Sektor Riil/UMKM, antara lain :

- a. Dalam bidang usaha kecil dan menengah, sampai Tahun 2013 telah dikembangkan 20.524 unit usaha mikro 406.006 unit usaha kecil dan 908 unit usaha menengah dengan klasifikasi usaha terdiri dari 329.210 unit usaha industri, 58.002 unit usaha perdagangan. dan 37.621 unit usaha jasa. Pemerintah Provinsi juga memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pengolahan produk bagi 800 UMKM dan memberikan bantuan peralatan bagi pedagang kecil berupa tenda, gerobak dan cool box sebanyak 940 unit. Selanjutnya di bidang perdagangan, juga dibangun

pasar tradisional di Kabupaten Malinau, Bulungan dan Balikpapan yang secara total mampu menampung sekitar 200 pedagang.

- b. Dalam rangka percepatan pembangunan perkebunan rakyat, maka melalui program Revitalisasi Perkebunan yang difasilitasi oleh Bank Mandiri dan Bank BRI telah terbangun kebun sawit rakyat seluas 27.468 Ha yang melibatkan petani sebanyak 12.668 KK dan realisasi kredit sebesar Rp. 586,27 milyar.
- c. Program kredit pangan sejahtera yang pembiayaannya bersumber dari Dana Pendapatan Daerah Kalimantan Timur telah di launching oleh Gubernur Kalimantan Timur Bersama Direktur Utama BPD Kalimantan Timur pada bulan Januari 2013. Hingga akhir Tahun 2013 telah terrealisasi Kredit Pangan Sejahtera sebesar Rp. 216 Milyar kepada sejumlah Kelompok Tani dan Koperasi Pertanian.
- d. Program Kredit Ternak Sejahtera melalui Bank Kalimantan Timur telah membantu peternak dalam peningkatan skala usaha yang akan merubah usaha sambilan menuju ke usaha peternakan sebagai cabang usaha maupun usaha pokok. Penyaluran Kredit Ternak Sejahtera pada tahun 2013 sebesar Rp 14,95 Milyar dari plafon dana sebesar Rp 19,19 Milyar atau sebesar 77,91 %.
- e. Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna (IB dan ET), dengan memanfaatkan kotoran ternak sebagai bahan baku instalasi biogas sebanyak 125 unit yang tersebar di 9 kabupaten/kota antara lain Paser 18 unit, PPU 15 unit, Kutai Barat 10 unit, Kutai Timur 20 unit, Samarinda 5 unit, Berau 20 unit, Kutai Kartanegara 17 unit, Bulungan 15 unit, dan Malinau 5 unit. Energy yang dihasilkan dari Instalasi biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar memasak menggunakan kompor, rice cooker dan lampu penerangan. Disamping itu juga dihasilkan pupuk cair dan pupuk padat sebagai tambahan penghasilan rumah tangga peternak.

- f. Dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perusahaan pertambangan batubara melalui program CSR telah mengembangkan ternak sapi baik di areal bekas tambang maupun pada desa binaan di sekitar wilayah pertambangan adalah PT. Kitadin Embalut sebanyak 604 ekor, PT. Kideco Jaya Agung sebanyak 80 ekor, PT. Berau Coal sebanyak 175 ekor dan PT. KPC 124 ekor.

## **2.3. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

2. Pertanian : untuk kredit permasalahan adanya agunan yang ditetapkan bank sedang petani tidak memilikinya
3. Peternakan : Permasalahan peternakan adalah kurangnya modal dalam pelaksanaan peternakan, permasalahan kurangnya sumber bibit. Dalam pelaksanaan kredit petani langsung mengajukan kredit kepada Bank kaltim sistem pembayaran pun dilakukan perorangan langsung kepada Bank kaltim. Penyebaran kredit dilakukan di 14 Kab/Kota.
4. Kurangnya informasi petani peternak tentang program pemerintah dalam bidang permodalan/pembiayaan melalui perbankan.
5. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani peternak dalam mengelola usaha ternaknya

### **b. Solusi**

- Pemerintah Pusat dalam hal Kementrian Pertanian RI telah meluncurkan berbagai produk untuk mempermudah mendapatkan modal melalui : Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

- Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Bank kaltim juga telah meluncurkan Program Kredit Ternak Sejahtera (KTS).
- Mengadakan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan penyuluhan kepada petani peternak agar trampil dalam memelihara ternaknya sehingga memperoleh kesuksesan yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

### 3. Prioritas 6 : Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan

#### 3.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 6; Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan adalah melalui pelaksanaan 7 program dan 16 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11,72 Milyar.

**Tabel 4.14 Program Kegiatan Prioritas  
terkait Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan**

PRIORITAS 6 : Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan			
No		Program/Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		DINAS KEHUTANAN
	1.1	Rehabilitasi Lahan Kritis	
	1.2	Rehabilitasi Hutan Mangrove	
	1.3	Penertiban Tutupan Lahan (HTI,Kebun Sawit, KP dan PKP2B) IUPHHK-HT	
	1.4	Penanaman 1 juta batang bibit	
	1.5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
2	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		
	2.1	Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur	

	2.2	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pelestarian Alam	
	2.3	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
3	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		
	3.1	Pengurangan Emisi dari Deforestai dan Degradasi Hutan	
4	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan		Dinas Kelautan dan Perikanan
	4.1	Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan		Dinas Pertambangan dan Energi
	5.1	Pengawasan Pertambangan Umum	
	5.2	Pembinaan dan Pengawasan Sektor	
6	Program Pengawasan dan Penertiban		
	6.1	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	
	6.2	Inventarisasi dan Evaluasi Dampak Kerusakan Geologi Tata Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat	
7	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi		
	7.1	Pembinaan dan Pengelolaan ABT / AP	
	7.2	Pemetaan Cekungan Air Tanah	

### 3.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 6; Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 89,98 %. Beberapa capaian hasil pembangunan Prioritas 6 Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain :

- a. Luas lahan kritis mengalami penurunan dari 5.186.002 Ha pada Tahun 2009 menjadi 2.686.967,19 Ha pada Tahun 2013

mencapai. Jumlah titik api (hotspot) 2.028 titik di Tahun 2009 hingga sampai dengan Tahun 2013 berkurang menjadi 1.119 titik.

- b. Pelaksanaan program Kalimantan Timur Hijau berupa kegiatan penanaman berbagai jenis tumbuhan pada daerah-daerah lahan kritis, eks tambang dan lokasi lainnya melalui program 1 orang 5 pohon (one man five trees). Sampai Pada Tahun 2013 telah dilakukan penanaman sebanyak 175.203.172 batang pohon. Kalimantan Timur juga mencanangkan Program OMFIT (One Man Five Trees) periode 01 Februari 2011 hingga 31 Januari 2013 telah berhasil menanam pohon sebanyak 127.178.052 batang pohon di bidang kehutanan dan Non Kehutanan menanam pohon sebanyak 48.025.120 batang pohon.
- c. Saat ini Kalimantan Timur juga aktif dalam pembangunan demonstration activity (DA) pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD). Kabupaten Berau dan Kabupaten Malinau menjadi dua kabupaten pertama yang terlibat dalam DA-REDD yang akan di dukung oleh Pemerintah Jerman (melalui GTZ, KfW) dan TNC. Demonstration Activities (DA) – Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation (REDD) kerjasama Pemerintah Indonesia-Jerman di Kalimantan Timur, merupakan bagian dari Forests and Climate Change Program (FORCLIME), yang terbagi kedalam dua fase, yaitu mendukung kegiatan readiness dan investasi dalam implementasi DA di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Malinau dan Berau.

### **3.3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- 1. Data laju perkembangan lahan kritis dan sebarannya yang diterbitkan oleh berbagai pihak tidak sama sehingga membuat kerancuan dalam menetapkan



rencana rehabilitasi hutan dan lahan beserta kebijakan yang perlu diambil.

2. Pelaksanaan kegiatan RHL tidak berjalan secara optimal karena terbentur dengan masalah tenurial di lapangan.
3. Kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar hutan masih rendah (Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Rakyat Kemitraan, Hutan Desa, Hutan Adat, Pengembangan HHBK), sementara itu investasi di bidang kehutanan kurang menarik bagi masyarakat tersebut sehingga menjadi kendala utama didalam peningkatan peran serta masyarakat pada kegiatan pembangunan bidang kehutanan yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya peningkatan kesejahteraan masyarakat didalam dan di sekitar hutan serta meningkatnya kerawanan hutan.
4. Perkembangan pembangunan diluar sektor kehutanan berakibat pada hilangnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan lahan garapan pada kawasan areal penggunaan lain, sehingga masyarakat melakukan perambahan hutan yang pada akhirnya menimbulkan lahan kritis.
5. Jumlah *hotspots* (titik api) sangat dipengaruhi oleh cuaca panas pada musim kemarau dimana masyarakat sekitar hutan yang kebanyakan berprofesi sebagai peladang tadah hujan mulai membuka lahan dengan cara membakar, ketika musim kemarau berakhir dan hujan mulai turun, peladang memulai kegiatan penanaman padi.
6. Pembakaran vegetasi juga dilakukan oleh pelaku illegal logging agar memudahkan mereka mencari kayu jenis ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dan kayu-kayu keras (klas

awet 1) lainnya yang telah rebah/telah mereka tebang pada masa lalu, untuk di olah menjadi kayu pertukangan.

#### **b. Solusi**

1. Perlu dilakukan sinkronisasi data laju perkembangan lahan kritis dan sebarannya dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi yang ditetapkan penggunaannya oleh Kementerian Kehutanan sebagai bahan penetapan lahan kritis dan kebijakan pengelolaan lahan kritis oleh Gubernur. Laju perkembangan perubahan tutupan lahan tidak diikuti oleh review kebijakan dalam pembangunan sektor lainnya (perkebunan, pertambangan dan pertanian) sehingga perlu diadakan instrument untuk bahan review (updating) secara periodik.
2. Segera ditetapkan sistem penyelesaian masalah tenurial yang manusiawi dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan sejarah budaya, keberadaan masyarakat yang ada.
3. Peningkatan kegiatan sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan dengan memberikan insentif pinjaman modal dengan bunga lunak dan memberikan pendampingan untuk peningkatan mutu produk serta memberikan jaminan/fasilitasi terhadap pemasaran produk secara berkelanjutan.
4. Pembinaan dan fasilitasi peran serta masyarakat didalam pembangunan kehutanan yang menggunakan jenis-jenis tanaman multi purpose (MPTS) sehingga penutupan lahan tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

5. Peningkatan pengawasan, pengendalian, pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap akses jalan yang dibangun oleh perusahaan dalam hal pengamanan kawasan hutan.

#### 4. Prioritas 7 : Peningkatan Daya Saing dan Investasi

##### 4.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 7; Peningkatan Daya Saing dan Investasi adalah melalui pelaksanaan 9 program dan 17 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,95 Milyar.

**Tabel 4.15 Program Kegiatan Prioritas  
terkait Peningkatan Daya Saing dan Investasi**

PRIORITAS 7 : Peningkatan Daya Saing dan Investasi			
No		Program/Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (PARIWISATA)
	1.1	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	
	1.2	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri	
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
	2.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	
	2.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	
3	Program Pengembangan Kemitraan		
	3.1	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan	
4	Program Nilai Budaya Seni dan Film		
	4.1	Pengembangan nilai budaya seni dan film	
5	(PERDAGANGAN LUAR NEGERI) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (PERDAGANGAN)
	5.1	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		
	6.1	Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait /Asosiasi / Pengusaha	

	6.2	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Dinas Pertambangan dan Energi
7	<b>(PERDAGANGAN DALAM NEGERI) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>		
	7.1	Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	
	7.2	Kegiatan Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP	
	7.3	Kegiatan Peningkatan dan Jaringan Informasi Perdagangan	
	7.4	Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Pengembangan Usaha	
8	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</b>		
	8.1	Pengembangan Sektor Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Timur	
	8.2	Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral Kalimantan Timur	
9	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>		
	9.1	Pembinaan, Pengawasan dan Perencanaan Ketenagalistrikan	
	9.2	Konversi Energi	

## 4.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 7; Peningkatan Daya Saing dan Investasi pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 83,37 %.

Beberapa capaian hasil pembangunan Prioritas 7 Peningkatan Daya Saing dan Investasi, antara lain :

- a. Pengembangan Destinasi wisata pada Tahun 2013 sebanyak 444 obyek wisata, meningkat dibanding Tahun 2012 sebanyak 401 obyek wisata. Kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur untuk Wisman meningkat 3,49% dan Wisnus meningkat 6,69% dan pada Tahun 2013 mencapai sebanyak 1.453.962 orang terdiri dari Wisman 27.063 orang dan Wisnus 1.426.899 orang dengan pendapatan yang bersumber dari Wisnus Rp. 513,68

Milyar dan Wisman US\$ 27,06 juta. Melakukan Pameran pariwisata lima kali di luar daerah dan satu kali di Samarinda. Jumlah Sanggar Seni dan Seni Budaya yang terbina sampai dengan Tahun 2013 mencapai 992. Selain itu, Kepulauan Derawan Kabupaten Berau Kalimantan Timur ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai salah satu dari 15 Destinasi Unggulan/*Destination Management Organization (DMO)* di Indonesia.

- b. Walaupun terjadi penurunan besaran ekspor dan peningkatan impor, akan tetapi di Tahun 2013 Kalimantan Timur mengalami surplus neraca perdagangan sebesar US\$ 21,44 Milyar. Ekspor ke luar negeri Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar US\$30,88 Milyar mengalami penurunan sebesar 15,43% dibanding Tahun 2012 sebesar US\$ 36,52 Milyar, terdiri dari Ekspor Migas sebesar US\$ 12,75 Milyar dan Non Migas sebesar US\$ 18,13 Milyar. Ekspor ke luar negeri Kalimantan Timur yang tertinggi adalah dengan Negara tujuan China, India dan Jepang. Sementara itu, realisasi impor dari luar negeri Tahun 2013 mencapai US\$ 9,44 Milyar yaitu dengan migas sebesar US\$ 7,19 Milyar dan non migas sebesar US\$ 2,26 Milyar. Pada Tahun 2013 realisasi impor non migas Kalimantan Timur didominasi oleh China, Singapura, USA dan Jepang.
- c. Cluster industri yang berbasis gas dan kondensat, terutama produk petrokimia yang terletak di kawasan industri Bontang dengan produk kimia berupa urea, amoniak, soda ash dan methanol, sudah dalam proses penyelesaian proyek pembangunan ammonium nitrat dan telah dilakukan penambahan kapasitas produksi urea dengan pembangunan pabrik urea unit 5.

- d. Batubara sebagai primadona Provinsi Kalimantan Timur telah berproduksi mencapai sebesar 229.109.604 MT Milyar Ton sampai Tahun 2013. Jumlah produksi tersebut dihasilkan dari 22 PKP2B yang beroperasi dari 33 PKP2B, serta dari 445 IUP dari total Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 1.443. Penerimaan negara dari royalty batubara di Kalimantan Timur pada Tahun 2013 mencapai Rp.1,395 Trilyun dan luran tetap sebesar Rp. 9.5 Milyar.
- e. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk migas dan Gas Metana Batu Bara (GMB) terdapat 79 WKP, yang terdiri dari 33 WKP status eksploitasi, dengan potensi gas bumi pada Tahun 2013 17,12 TCF, Minyak Bumi 514 Juta Barel dan GMB sebesar 108 TCF. Target produksi minyak bumi Tahun 2013 sebesar 44 juta barrel, produksi gas bumi sebesar 760 juta MMBTU.
- f. Capaian hasil pembangunan bidang ketenagalistrikan sampai dengan Tahun 2013 daya terpasang sebesar 737.4 MW, daya mampu 529.60 MW, beban puncak 443,30 MW. Sedangkan untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.839.42 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 5.076.3 kms. Untuk mengatasi persoalan kekurangan kelistrikan di Kalimantan Timur, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain; pembangunan PLTU 2x110 MW bekerjasama dengan PLN pada Tahun 2013 mencapai 75,64 %; PLTU Gunung Bayan 2x15 MW kerjasama dengan Perusda Balikpapan dengan PT.Gunung Bayan di Kariangau yang progress pembangunannya mencapai 75%; PLTG Peaking PLN 2 x 50 MW progress pembangunannya mencapai 99,25%; PLTG Senipah 2 x 41 MW progress pembangunannya mencapai 98.5%; PLTU Cahaya Fajar

Kalimantan Timur (CFK) 1 x 50 MW progress pembangunannya pada saat ini mencapai 30%.

- g. Dalam rangka mendukung penyediaan energi terbarukan, konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kg ke rumah tangga dan usaha kecil, pada Tahun 2013 mencapai 98.92%. Disamping itu telah dibangun pembangkit listrik dengan menggunakan bahan baku (*gas methane*) yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) sebagaimana yang telah dilakukan di PT. REA Kalimantan Timur Plantations yang merupakan *best practice* di Asia Tenggara, diharapkan langkah yang telah ditempuh oleh PT. REA Kalimantan Timur Plantations akan diikuti oleh Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) lainnya yaitu PT. Prima Mitra Mandiri Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kertanegara dan PT. Indonesia Plantations Sinergi di Desa Maloy, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur.

#### **4.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **a. Permasalahan**

- Masih terdapatnya penerbitan perijinan/non perijinan yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis.
- Pengelolaan layanan pengaduan yang belum maksimal.
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata.

##### **b. Solusi**

- Komitmen dan konsistensi yang kuat serta berkelanjutan dari seluruh stakeholder, dalam melakukan upaya reformasi perijinan.
- Peningkatan sarana dan prasarana promosi pariwisata di bandara-bandara internasional.

- Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengelola usaha-usaha pariwisata, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Obyek wisata/destinasi wisata sesuai standar obyek wisata unggulan.
- Meningkatkan promosi pariwisata melalui berbagai media baik media cetak maupun media elektronik serta media yang berbasis informasi teknologi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang kebudayaan dan pariwisata guna meningkatkan skill, wawasan dan profesionalisme.

## 5. Prioritas 9 : Pembangunan Infrastruktur

### 5.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 9; Pembangunan Infrastruktur adalah melalui pelaksanaan 1 program dan 2 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15,55 Miliar.

**Tabel 4.16 Program Kegiatan Prioritas terkait Pembangunan Infrastruktur**

<b>PRIORITAS 9 : Pembangunan Infrastruktur</b>			
<b>No</b>		<b>Program/Kegiatan</b>	<b>SKPD Pelaksana</b>
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>
	1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	
	1.2	Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	

### 5.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan dalam urusan pilihan terkait untuk pencapaian target prioritas 9 : Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 95,79%, antara lain :

- Peningkatan jalan tani (jalan transmigrasi) 4 Km Sp. Meratak dan 1 Km Sp. 7 Tepian Langsung.



- Rancang Kavling dan DED Kawasan Permukiman Transmigrasi di Maloy.
- Fasilitas Sosial dan Ekonomi yang tersebar di 14 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).

### **5.3 Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan :**

Belum selesainya proses pengesahan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur sebagai peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum status lahan bagi pengembangan kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga menghambat rencana kerja pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan transmigrasi sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi.

#### **b. Solusi :**

Percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah.

## **Agenda 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial**

### **1. Prioritas 2 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

#### **1.1. Program dan Kegiatan**

Upaya pencapaian prioritas 2; Penanggulangan Kemiskinan adalah melalui pelaksanaan 4 program dan 6 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24,94 Milyar.

**Tabel 4.17 Program Kegiatan Prioritas  
terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

PRIORITAS 2 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan				
No		Program/Kegiatan		SKPD Pelaksana
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	1.1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis		
	1.2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis		
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	2.1	Pengembangan desa mandiri pangan		
	2.2	Pengembangan lumbung pangan desa		
3	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.1	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir		
4	Program Diversifikasi Bahan Bakar			Dinas Pertambangan dan Energi
	4.1	Pengembangan Energi		
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	5.1	Pengembangan desa mandiri pangan		
	5.2	Pengembangan lumbung pangan desa		

## **1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program kegiatan dalam urusan pilihan terkait untuk pencapaian target prioritas 2; Penanggulangan Kemiskinan pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 97,93 %.

- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tahun 2013 sedang dipasang 2.939 unit pada 28 Desa oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur. Rasio rumah tangga berlistrik/rasio elektrifikasi (RE) Tahun 2013 naik menjadi 65,92%.
- Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, telah dilaksanakan pengembangan Desa Mandiri Pangan, dan sampai

Tahun 2013 menjadi 79 desa termasuk desa inti dan desa replikasi. Pembangunan Lumbung Pangan menjadi 58 unit hingga Tahun 2013. Untuk menjaga kestabilan tingkat harga pada saat panen raya, maka dilaksanakan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada 29 kelompok usaha Gapoktan di 12 Kabupaten/Kota.

### **1.3. Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan**

- Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan akses infrastruktur jalan dan pola sebaran kawasan pedesaan yang menyebar menyebabkan tingginya biaya mobilisasi bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin di pedesaan, sehingga program pengembangan usaha ekonomi miskin di pedesaan masih belum optimal.
- Keterbatasan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam terbarukan dan berkelanjutan karena sebagian besar lahan non kehutanan di pedesaan di kuasai oleh perusahaan besar sektor pertambangan dan perkebunan, sementara kawasan hutan tidak dapat dikelola oleh masyarakat.
- Belum terintegrasinya program CSR yang di laksanakan oleh pihak swasta dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan usaha produktif masyarakat miskin.

#### **Solusi**

- Integrasi program pengembangan infrastruktur baik antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk

meningkatkan akses hingga pada kawasan perdesaan kantong kemiskinan di Kalimantan Timur.

- Reformasi regulasi terkait pertanahan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam terbarukan (pertanian dalam arti luas) secara berkelanjutan.
- Meningkatkan peran dan kemitraan CSR perusahaan swasta pertambangan, perkebunan, kehutanan untuk mendukung penguatan Diversifikasi usaha ekonomi produktif masyarakat miskin terintegrasi dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## 2. Prioritas 3 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

### 2.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 3; Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah melalui pelaksanaan 3 program dan 8 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29,48 Milyar.

**Tabel 4.18 Program Kegiatan Prioritas  
terkait Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

PRIORITAS 3 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja			
No		Program/Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan		Dinas Perkebunan
	1.1	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	
	1.2	Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Dinas Kelautan dan Perikanan
	1.1	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan	
	1.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	
3	Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA		Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	3.1	Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa	
	3.2	Praktek Kerja Usaha (PKU) kelas III di Luar Daerah	
	3.3	Ekstra Kulikuler Siswa	
	3.4	Proses Belajar Mengajar	

## **2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program kegiatan terkait untuk pencapaian target prioritas 3; Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Tahun 2013 rata-rata mencapai 81,00 %.

- Walaupun terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian sebesar 5,85 % akan tetapi bidang pertanian dalam arti luas masih menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 26,61 % dari seluruh lapangan usaha.
- Perikanan Pembudidaya menyerap tenaga kerja sebanyak 62.974 orang, sedangkan Perikanan Tangkap menyerap tenaga kerja sebanyak 79.674 orang.
- Peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh pertanian melalui sekolah kejuruan pertanian sebanyak 92 orang.
- Tersedianya kesempatan kerja di bidang peternakan adalah sebesar 104.397 orang, hal ini terjadinya karena semakin bertambahnya masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang peternakan, termasuk semakin bertambahnya kelompok petani peternak, sehingga semakin terbuka kesempatan kerja bagi petani peternak untuk mengembangbiakkan ternak yang dapat meningkatkan taraf perekonomian petani peternak maupun masyarakat. Diharapkan dengan memberikan bantuan ternak kepada petani/peternak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beternak dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

## **2.3. Permasalahan dan Solusi**

### **Permasalahan :**

- Jumlah lowongan pekerjaan tidak sesuai dengan keterampilan/persyaratan yang di perlukan.

- Sektor minyak dan gas tidak bersifat padat karya sehingga rendah daya serapnya terhadap angkatan kerja.
- Dinas Pertanian : Untuk Penyerapan tenaga kerja permasalahan tenaga muda banyak beralih ke sub diluar pertanian sedangkan tenaga kerja yang ada sudah tua sehingga tenaga kerja yang ada tidak mencukupi. Untuk mengimbangi tenaga kerja maka dilakukan mekanisasi.

**Solusi :**

- Melakukan diklat bagi pencari kerja dengan materi sesuai kebutuhan di pasar kerja.
- Mengembangkan sektor-sektor yang bersifat padat karya, khusus sektor pertanian dalam arti luas.